

**PENGARUH PENDAPATAN DAN RELIGIUSITAS WAJIB
PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN DI DESA KEDUNGKELOR
KECAMATAN WARUREJA KABUPATEN TEGAL**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata S.1
Dalam Ilmu Ekonomi Islam



Oleh :

ROSI ISWARA
1405026033

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2019**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka kampus III Ngaliyan (024) 7601291 Fax. 7624691
Semarang 50185

Hal : PERSETUJUAN PEMBIMBING
An. Sdri. Rosi Iswara

Kepada
Yth. Dekan Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Walisongo

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Rosi Iswara
NIM : 1405026033
Jurusan : Ekonomi Islam
Judul : Pengaruh Pendapatan dan Religiusitas Wajib Pajak Terhadap
Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Desa
Kedungkelor Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera diujikan. Demikian

Harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 25 Juli 2019

Pembimbing I

Dr. H. Muhlis, M.Si
NIP. 196101171988031002



Pembimbing 2

Heny Yuningrum, S.E., M.Si.
NIP. 19810609200710 2 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

*Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Kota Semarang 50185
Telp/Fax. (024) 7606405 Web: fs.walisongo.ac.id*

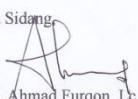
PENGESAHAN

Nama : Rosi Iswara
NIM : 1405026033
Judul : **PENGARUH PENDAPATAN DAN RELIGIUSITAS
WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN
PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DIDESA KEDUNGKELOR**

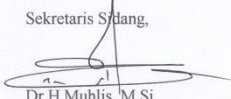
Telah Dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat Cumlaude/ Baik/ Cukup pada tanggal 12 September 2019. Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2019/2020

Semarang, 12 September 2019

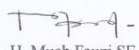
Ketua Sidang,

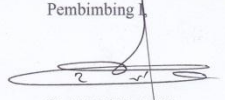

Dr. H. Ahmad Furqon, Dc, M.Ag.
NIP. 19751218 200501 1 002

Sekretaris Sidang,

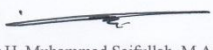

Dr. H. Muhlis, M.Si
NIP. 196101171988031002

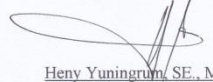
Penguji I,


H. Much Fauzi, SE, MM
NIP. 19730217 200604 1 003
Pembimbing I,


Dr. H. Muhlis, M.Si
NIP. 196101171988031002

Penguji II,


Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag.
NIP. 19700321 199603 1 003
Pembimbing II,


Heny Yuningrum, SE, M.Si
NIP. 19810609200710 2 005

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi yang telah penulis selesaikan yang berjudul “pengaruh pendapatan dan religiusitas wajib pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan desa kedungkelor warureja tegal” benar-benar karya penulis dan sama sekali tidak berisi materi tulisan orang lain ataupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan yang dilakukan sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku.

Semarang, 25 Juni 2019.



Rosi Iswara

NIM. 1405026033

MOTTO

وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ۗ
قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿٣﴾

Dan Dia memberinya rezki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. dan Barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)Nya. Sesungguhnya Allah telah Mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Qs. Ath Thalaq 3

PERSEMBAHAN

Dengan segenap kerendahan hati kupersembahkan Skripsi ini kepada orang-orang yang telah memberikan warna dalam hidupku :

1. Orang tuaku tercinta Ibu Winarni yang senantiasa mendukung dalam setiap langkahku dan selalu memberikan kasih sayang, bantuan dan dorongan dengan tulus, ikhlas dan moril serta materil. Ini adalah sebagai perjuangan dan cita-citaku. Do'a dan dukungan darimu senantiasa terus kuharapkan agar langkahku esok terus maju.
2. Saudara-saudaraku, Mba Eka, Mba Weni Mas Mono Mba Erlin yang aku sayangi, terima kasih telah menjadi penyemangat dalam harihariku. Semoga kita menjadi anak yang sholeh, sholehah dan berbakti kepada orang tua.
3. Keponkanku Friska Arinda. Terima kasih atas Do'a dan semangatnya.
4. Keluarga besarku mbah putri, semua tante dan om, juga sepupu. Terima kasih atas Do'a dan semangatnya.
5. Untuk kekasihku Tsabit Aqil Al Munawwar SH, terima kasih atas nasihat, dan dukungan selama ini.
6. Untuk senior Wahab Hasbulloh SEI, MM, terima kasih atas bimbingan, nasihat, dukungan, dan bantuannya selama ini.
7. Untuk teman-teman EIA 2014, kalian yang telah mengajarkanku arti dari persahabatan untuk menjadi sebuah persaudaraan dalam satu keluarga besar yang saling mendukung dan mendo'akan disetiap

langkah perjuangan hidup ini. Kalian telah mengajarku untuk menjadi pemimpin yang hebat.

Akhirnya kupersembahkan karya sederhana ini untuk ketulusan kalian semua semoga apa yang aku impikan akan menjadi kenyataan. Amin ...

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Pengaruh Pendapatan dan Religiusitas Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Desa Kedungkelor Tegal. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui: seberapa besar pengaruh pendapatan terhadap kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan desa kedungkelor warureja tegal, seberapa besar pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan pembayaran pajak desa kedungkelor warureja tegal.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskriptive Kuantitatif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode kuesioner (angket). Subyek penelitian menggunakan sampel 95 responden. Teknik pengambilan sampel dengan teknik *Incidental Sampling*. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer penelitian ini diperoleh langsung dari lokasi penelitian yaitu Desa Kedungkelor kecamatan Warureja Kabupaten Tegal. Metode analisis datanya menggunakan regresi berganda binari, menilai kelayakan model regresi, menilai keseluruhan model (overall model fit), menguji koefisien regresi, penafsiran dan prediksi, sedangkan pengolahannya menggunakan SPSS 24.

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa variabel pendapatan benar-benar berpengaruh terhadap probabilitas kepatuhan membayar pajak pada masyarakat desa kedungkelor. variabel religiusitas benar-benar berpengaruh terhadap probabilitas kepatuhan membayar pajak pada masyarakat desa kedungkelor.

Kata Kunci: Pendapatan, Religiusitas dan Kepatuhan

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT, penguasa alam semesta karena segala rahmat, taufiq dan hidayah-Nya. Tak lupa kita panjatkan shalawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi yang berjudul “PENGARUH PENDAPATAN DAN RELIGIUSITAS WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DESA KEDUNGKELOR KECAMATAN WARUREJA KABUPATEN TEGAL”. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan S1 pada jurusan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa proses penyusunan Skripsi ini dapat selesai berkat bantuan dari pihak, bimbingan dan dorongan serta perhatiannya. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr.H. Muhibbin, M.Ag selaku rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr.H.Imam Yahya, M.Ag selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Ahmad Furqon Lc.MA Selaku Kajor Ekonomi Islam
4. Bapak M. Nadhir M.Ag Selaku Sekjur Ekonomi Islam
5. Bapak Dr.H.Muchlis M.Si. selaku dosen pembimbing I dan Ibu Heny Yuningrum, SE., M.Si. selaku pembimbing II dari Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyusunan Skripsi ini.

6. Seluruh dosen pengajar Program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
7. Orang tuaku Ibu Winarni yang senantiasa mendukung dalam setiap langkahku. Dan selalu memberikan kasih sayang, bantuan dan dorongan dengan tulus, ikhlas dan moril serta materil.
8. Kakak-kakak ku tercinta (Eka Weni Mono Erlina) serta yang telah memotivasi, mendoakan dan selalu memberi semangat tiada henti. Semoga Allah SWT memberikan kebahagiaan, kesehatan dan rejeki yang halal serta barokah.
9. Sahabat ku (Nurmi Renoning Galih, Riska Cristiana Devi, Siti Rahmawati, Dewi Mei Anggraeni, Khoiriyah, Irma Dwi Arini, Istifadatun, Wulan Wahfiroh, Tutik Khoirotun Nafi'ah, Malinda, Manunal Ahna) yang selalu memberikan motivasi dan semangat tanpa henti.
10. Teman-teman seperjuangan Ekonomi Islam angkatan 2014.
11. Temen-temen seperjuangan EIA 2014.
12. Temen-temen KKN Posko 65 Desa Sumogawe, Salatiga.

Penulis percaya bahwa Skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga penulis akan sangat berterimakasih atas kritik dan saran yang bersifat membangun guna penyempurna Skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 25 Juli 2019

Penulis

Rosi Iswara

NIM. 1405026033

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	12
1.5 Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
2.1 Pendapatan	16
2.1.1 Jenis sumber pendapatan.....	19
2.1.2 Faktor yang mempengaruhi pendapatan	20
2.2 Religiusitas.....	23
2.3 Kepatuhan Wajib Pajak.....	29

2.4	Pajak.....	34
2.4.1	Pengertian Pajak.....	34
2.4.2	Fungsi Pajak.....	36
2.4.3	Tarif Pajak.....	37
2.4.4	Sistem dalam Pemungutan Pajak	38
2.4.5	Kedudukan Hukum Pajak	39
2.4.6	Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan.....	40
2.4.7	Asas Pajak Bumi dan Bangunan	42
2.4.8	Subjek Pajak bumi dan bangunan	42
2.4.9	Objek Pajak Bumi dan Bangunan	44
2.5	Dasar Pengenaan Pajak	46
2.5.1	Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan	47
2.6	Pajak Dalam Islam	51
2.7	Penelitian Terdahulu	56
2.8	Kerangka pemikiran.....	59
2.9	Hipotesis Penelitian yang Relevan	59
BAB III METODE PENELITIAN		61
3.1	Jenis Penelitian.....	61
3.2.1	Populasi.....	61
3.2.2	Sampel.....	62
3.3	Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	65
3.3.1	Sumber Data.....	65
3.3.2	Teknik Pengumpulan Data.....	66
3.4	Variabel dan Indikator Penelitian	68

3.4.1 Definisi Konseptual.....	68
3.4.2 Devinisi Operasional Variabel dan Skala Pengukuran	70
3.5 TEKNIK ANALISIS DATA	72
3.5.1 Menilai Kelayakan Model Regresi	73
3.5.2 Menilai keseluruhan Model (overall model fit)	74
3.5.3 Menguji Koefisien Regresi	74
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....	75
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	75
4.1.1 Sejarah Desa Kedungkelor	75
4.1.2 Visi dan Misi	75
4.1.3 Struktur Organisasi Desa Kedungkelor Kecamatan Warureja	76
4.2 Karakteristik Responden	77
4.2.1 Jenis Kelamin Responden	77
4.2.2 Usia Responden	78
4.2.3 Pekerjaan Responden	79
4.2.4 Penghasilan Responden.....	79
4.3 Analisis Regresi Logistik	81
4.3.1 Deskriptif Statistik	81
4.3.2 Uji Kelayakan Model Regresi.....	82
4.3.3 Menilai Keseluruhan Model (overall Model Fit)	83
4.3.4 Menguji Koefisien Regresi	84
4.3.5 Penafsiran dan Prediksi	86
BAB V PENUTUP.....	88

5.1 Kesimpulan	88
5.2 Saran	89
5.3 Penutup	90

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	: Volume Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Desa Kedungkelor	3
Tabel 4.2	: Persentase Jenis Kelamin Responden	77
Tabel 4.3	: Persentase Usia Responden.....	78
Tabel 4.4	: Persentase Pekerjaan Responden	79
Tabel 4.5	: Persentase Penghasilan Responden.....	80
Tabel 4.6	: Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	81
Tabel 4.7	: Deskriptif Data.....	82
Tabel 4.8	: Hasil Uji Kelayakan Model Regresi.....	83
Tabel 4.9	: Hasil Model Regresi.....	84
Tabel 4.9	: Pengujian Hipotesis.....	85

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang senantiasa melakukan pembangunan di segala bidang. Pembangunan dilakukan untuk melindungi segala kepentingan rakyat, menyediakan sarana dan prasarana, memberikan pelayanan kepada rakyat, menegakkan hukum, serta memelihara ketertiban dan keamanan negara. Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan tentunya membutuhkan sumber dana dari masyarakat. Dana yang diperlukan untuk pembiayaan pembangunan salah satunya bersumber dari pungutan berupa pajak. Pajak merupakan salah satu sumber dana yang diyakini sebagai sumber utama dalam pembangunan. Untuk itu, dalam upaya menunjang pembiayaan dibutuhkan peran serta aktif dari masyarakat sebagai wajib pajak (WP) untuk berperan serta dalam menunjang kegiatan pembangunan. Adapun salah satu jenis pajak yang wajib dibayar oleh masyarakat sebagai wajib pajak adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi

kemakmuran rakyat.¹ Berkaitan dengan hal tersebut pentingnya pengelolaan pajak menjadi prioritas bagi pemerintah, berbagai jenis pajak yang dikenakan kepada masyarakat beberapa diantaranya yaitu Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan Pajak yang dikenakan atas objek pajak bumi dan bangunan yang diatur pengenaannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.²

Fungsi yang paling utama atau pokok dari pajak adalah sebagai sumber pendapatan negara. Pajak merupakan komponen utama untuk mengisi kas negara. Dalam beberapa literatur yang lain, fungsi ini disebut juga dengan fungsi budgetair atau fungsi penerimaan (*revenue function*). Karena itu, suatu pemungutan pajak yang baik sudah seharusnya memenuhi asas (*revenue productivity*). Tujuan utama dari setiap sistem pajak dan lembaga pelaksanaannya adalah menghimpun sejumlah penerimaan yang cukup untuk membiayai komitmen pemerintah. Seberapa besar penerimaan tiap tahun yang dianggap cukup dan harus dihimpun sudah ditetapkan dalam APBN/APBD.³

¹ Dr. Haula Rosdiana, Msi dan Dr Edi Slamet Irianto, msi, *Pengantar Ilmu Pajak*, (Pt raja grafindo Persada, Jakarta, 2012), h.

² Ahmad Tjahjono dan Triyono Wahyudi, *Perpajakan Indonesia: Pendekatan Soal Jawab dan Kasus*, (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2005), h. 345

³ Haula Rosdiana, “*Pengantar Ilmu Pajak: Kebijakan dan*

Dalam upaya peningkatan penerimaan pajak harus diikuti dengan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak maka ikut serta meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak sehingga dapat meningkatkan pendapatan negara. Kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak dibutuhkan untuk kelancaran penarikan pajak. Begitu pula dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan juga dibutuhkan kepatuhan yang tinggi dari WP PBB. Kepatuhan wajib pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak memenehui semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Namun, dalam kenyataannya negara sering kesulitan memungut pajak yang salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan.

Tabel 1

Volume Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan
di Desa Kedungkelor Periode 2013-2017

Tahun	Jumlah	Presentase
2013	123.124.710	-
2014	118.102.360	(-) 4,25 %
2015	124.629.097	5,23 %

2016	130.270.491	4,33 %
2017	145.850.603	10,68 %

Sumber: sekretaris desa kedungkelor

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi PBB di Desa Kedungkelor Kecamatan Warurejo Kabupaten Tegal mengalami penerimaan secara fluktuatif dari jumlah presntase yang dimulai tahun 2013. Pada awalmya di tahun 2013 dana yang di peroleh sebesar Rp.123.124.710. pada tahun 2014 presentasenya menurun sebesar 4,25%. Namun pada tahun 2015 presentase perolehan dana naik menjadi 5.23%. pada tahun berikutnya perolehan dana mengalami penurunan kembali dengan presentase sebesar 4,33%. Tahun 2017 perolehan dana mengalami kenaikan sebesar Rp.145.850.603 dengan presentase sebesar 10,68%.

Penerimaan PBB yang mengalami kenaikan atau penurunan menunjukkan pajak merupakan urgensi bagi masyarakat. Tidak stabilnya penerimaan PBB dikarenakan masih kurangnya kesadaran masyarakat WP dalam membayar PBB, terbukti masih banyaknya WP yang terlambat dalam membayar pajak PBB. Hal ini diduga karena faktor pendapatan wajib pajak yang berbeda-beda, pengetahuan atau religiusitas wajib pajak tentang perpajakan kurang dan kepatuhan terhadap sanski yang belum maksimal. Oleh karena itu penelitian yang akan di teliti penulis adalah pendapatan, religiusitas dan kepatuhan dalam

pembayaran wajib pajak.

Pemerintah daerah dalam pelaksanaan penarikan PBB masih banyak menghadapi kendala antara lain masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar PBB. Seperti yang terjadi pada wajib pajak di wilayah Kecamatan Warurejo Kabupaten Tegal Khususnya di Desa Kedungkelor. Desa kedungkelor dilihat dari letak geografisnya merupakan desa yang berada di kecamatan Warureja, kabupaten Tegal, provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Desa Kedungkelor mempunyai luas 795 ha dengan batas wilayah sebelah barat laut Jawa, sebelah timur Desa Lawangrejo, sebelah selatan Desa Banjarturi, sebelah barat Desa Demangharjo. Jumlah kartu keluarga di Desa warurejo terdiri dari 1.822 KK, Sedangkan besar penduduk Desa Kedungkelor beragama Islam masyarakat Desa Kedungkelor rata-rata bermata pencaharian petani, buruh tani, wiraswasta dan Ibu rumah tangga. Desa mempunyai kewenangan dalam mengurus pemerintahan yang ada di desa baik dalam pertumbuhan, perkembangan ekonomi, sosial budaya serta pembangunan yang berbasis kinerja lokal.

Pada rumah tangga pedesaan khususnya sering beranggapan bahwa sumber utama pendapatan masyarakat berasal dari lahan pertanian. Dimana dikaitkan luas tanah yang dimiliki dengan besarnya pendapatan rumah tangga petani. Masyarakat Desa Kedungkelor mayoritas bermata pencaharian pokok sebagai petani atau buruh tani. Hal ini dibuktikan dari data jumlah Kartu

keluarga sebesar 1143 sebagai buruh tani. Masyarakat pedesaan sering kali beranggapan bahwa apabila tanah dan bangunan yang dimiliki oleh petani luas, maka besar pula pendapatan yang diterima dalam keluarganya. Namun, pada kenyataannya menunjukkan bahwa pendapatan keluarga tidak lagi sepenuhnya tergantung kepada tanah yang dimiliki sebagai indikator utama rumah tangga. Realisasi PBB yang diterima setiap tahunnya terbukti masih banyak WP yang terlambat dalam membayar PBB. Hal ini terlihat bahwa realisasi PBB yang diterima setiap tahunnya tidak menentu, kadang mengalami kenaikan dan penurunan atau fluktuatif.

Hasil wawancara dengan Bapak Andri selaku sekretaris desa (Carik) mengatakan bahwa, pembayaran pajak di desa Kedungkelor masih di atasi oleh petugas desa dengan melakukan tugas pembantuan dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Teknik penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yaitu dengan memberi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) kepada masing-masing ketua RT. Selain itu pegawai kelurahan juga melakukan kontrol pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, dan melakukan *door to door* ke rumah warga untuk melakukan penagihan, pembayaran yang di lakukan mulai bulan april sampai dengan september, melebihi bulan september akan di kenakan denda 2% per satu bulan, ada beberapa masalah dalam

pembayaran pajak bumi dan bangunan diantaranya, kesadaran atau kepatuhan wajib pajak seperti kurang perhatian dalam hal jatuh tempo pajak bumi dan bangunan sehingga menimbulkan kurang disiplin wajib pajak dalam melakukan pembayaran menimbulkan keterlambatan dalam mengolah data untuk tahap berikutnya.

Adapun faktor pertama yang menjadi sebab telatnya masyarakat desa Kedungkelor dalam membayar pajak dikarenakan oleh penghasilan atau pendapatan yang diperoleh masyarakat dari berbagai pekerjaannya. Fraternesi (2002) dalam penelitiannya telah membuktikan bahwa faktor pendapatan mempengaruhi tingkat ketaatan wajib pajak dalam membayar pajak. Hal ini terjadi karena apa yang dibayarkan oleh wajib pajak untuk PBB bersumber dari penghasilan wajib pajak itu sendiri, sehingga besar kecilnya pendapatan wajib pajak mempengaruhi ketaatannya dalam membayar pajak. Menurut pardi (2009) dan Rauf (2013), penghasilan wajib pajak juga mempengaruhi kesadaran atau kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tepat pada waktunya. Sebelumnya dalam penelitian yang dilakukan oleh khoirotul Mustofa (2011) bahwa factor penghasilan tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Masyarakat yang memiliki pendapatan tinggi seharusnya tidak akan memiliki masalah dalam pembayaran PBB setiap tahunnya, namun berbeda untuk masyarakat yang memiliki pendapatan rendah bisa mengalami kesulitan dalam membayar pajak karena masih

banyaknya kebutuhan ekonomi yang harus didahulukan, dibandingkan dengan membayar kewajibannya.

Tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh lingkungan internal. Pengaruh lingkungan internal berasal dari wajib pajak sendiri, yaitu religiusitas. Religiusitas merupakan tingkat keterikatan seseorang terhadap agama yang di anut masing-masing individu (Widagsono, 2017). Semua agama di dunia ini memberikan petunjuk yang baik bagi pemeluk agamanya dengan menganjurkan untuk berperilaku yang baik dan mematuhi norma-norma yang berlaku.

Faktor kedua dari telatnya masyarakat dalam membayar pajak di karenakan oleh religiusitas. Menurut Pope dan Mohdali (2010) bahwa faktor religiusitas merupakan faktor yang sangat menentukan perilaku seseorang dalam membayar pajak.⁴ Kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak dibutuhkan untuk kelancaran penarikan pajak. Begitu pula dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan juga dibutuhkan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak bumi dan bangunan. Kepatuhan wajib pajak adalah suatu kesadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.⁵ Perlu diberi pengarahan bahwa pajak itu bukan semata-mata merupakan

⁴ Yesi Mutiara Basri dan Raja Adri Satriawan Surya, “*Pengaruh Keadilan, Norma Ekspektasi, Sanksi dan Religiusitas Terhadap Niat dan Ketidakpatuhan Pajak*,” universitas riau, vol VII no 3 (desember 2014)

⁵ Safri Nurmatu, “*Pengantar Perpajakan*”, Jakarta, Granit, 2003, h 148.

kewajiban setiap warga negara, tetapi juga merupakan hak setiap masyarakat untuk ikut serta dalam pembiayaan negara untuk pembangunan. Oleh karena itu, diharapkan setiap masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi untuk memenuhi kewajiban membayar pajak.

Bagi masyarakat kedungkelor yang mayoritas islam dan memiliki pengetahuan agama yang banyak, keyakinan terhadap agamanya, akan menciptakan seseorang yang berreligius, ketika wajib pajak yang memiliki religiusitas yang tinggi akan berusaha untuk patuh terhadap peraturan perpajakan. Menurut Utama dan Wahyudi (2016), Benk, et al (2016), Retyowati (2016), Anggraeni (2016) religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Widagsono (2017), Wati (2016), Rahmawaty (2014) menunjukkan bahwa religiusitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan wajib pajak memiliki pandangan yang berbeda antara urusan agama dengan urusan bisnis.

Al-Qur'an sendiri sudah menjelaskan tentang agama yaitu Q.S Az-Zariyat ayat 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku

Dalam ayat diatas Allah SWT menegaskan kepada seluruh umatnya baik jin ataupun manusia agar beribadah hanya kepada

Allah semata, baik lahir maupun batin. Sehingga, religiusitas dalam islam bukan hanya terjadi ketika seseorang melakukan ibadah ritual saja, melainkan juga ketika melakukan aktivitas sehari-hari. Religiusitas diwujudkan dalam berbagai sisi kehidupan manusia yang dapat berpengaruh terhadap perilaku individu tersebut, oleh sebab itu religiusitas juga dapat berpengaruh

Religiusitas merupakan sikap keagamaan seseorang untuk berlaku jujur dan bertindak adil sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Religiusitas yang dimiliki oleh seseorang ini akan berdampak bagus terhadap perilaku seseorang. Seseorang yang memiliki sikap jujur dalam kehidupan sehari-harinya akan bertindak bijaksana. Tindakan bijaksana ini dapat dilihat dari sikap seseorang dalam menjalankan kewajiban yang harus dilakukan. Salah satu kewajiban dari wajib pajak adalah kewajiban untuk memenuhi kewajiban perpajakan yaitu kewajiban membayar pajak dan kewajiban melaporkan pajak. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban pajak ini disebut dengan kepatuhan wajib pajak. Dengan kata lain, wajib pajak yang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak. Wajib pajak yang religius berusaha untuk mematuhi norma dan aturan yang berlaku.

Penelitian yang dilakukan oleh wulandari tentang pengaruh pendapatan, kualitas pelayanan dan penegakan hukum terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan

Bangunan di Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari pendapatan, kualitas pelayanan, dan penegakkan hukum terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB dan secara parsial kualitas pelayanan berpengaruh sangat besar.⁶

Penelitian Najla Ulfa Salsabila (2018) yang berjudul *Pengaruh Religiusitas, Nasionalisme, Kepercayaan Pada otoritas, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Variabel yang diteliti Tingkat Religiusitas, Nasionalisme, Kepercayaan pada Otoritas, Tax Amnesty, Kepatuhan wajib Pajak. Hasil Tingkat religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Nasionalisme tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kepercayaan terhadap otoritas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.⁷

Dengan melihat fenomena diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pendapatan dan Religiusitas Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Kedungkelor”**

⁶ Lia Wulandari, *“Pengaruh Pendapatan, Kualitas Pelayanan, dan Penegakkan Hukum Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan”*, Skripsi, Semarang: UNNES

⁷ Najla Ulfa Salsabila, *“Pengaruh Religiusitas, Nasionalisme, Kepercayaan Pada otoritas, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”*, Skripsi, Surakarta: UII, 2018

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Seberapa besar pengaruh pendapatan terhadap kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan di desa kedungkelor?
2. Seberapa besar pengaruh religiusitas wajib pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan di desa kedungkelor?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui besaran pengaruh pendapatan terhadap kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan pada masyarakat desa kedungkelor tegal.
2. Untuk mengetahui besaran pengaruh religiusitas wajib pajak terhadap terhadap kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan pada masyarakat desa Kedungkelor Tegal.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Mampu memberikan sumbangan ilmu dalam bidang ekonomi khususnya dalam bidang perpajakan. Serta menjadikan rujukan penulisan berikutnya tentang pengaruh

pendapatan dan religiusitas wajib pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan pada masyarakat desa Kedungkelor.

2. Bagi peneliti

Penelitian ini merupakan media yang baik untuk menambah pengetahuan, wawasan dan keterampilan dalam melakukan penelitian sekaligus mendalami teori yang berkaitan dengan perpajakan khususnya kemampuan pendapatan wajib pajak, religiusitas serta kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.

3. Manfaat bagi masyarakat desa Kedungkelor.

Dari hasil penelitian tersebut bagi kantor pelayanan pajak PBB Desa Kedungkelor Kecamatan Warurejo Kabupaten Tegal dapat dimanfaatkan sebagai tambahan bahwa info atas indikator-indikator yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak PBB, khususnya yang berkaitan erat dengan tingkat kemampuan wajib pajak, kesadaran dan religiusitas masyarakat.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian pada skripsi ini terdiri dari 5 bab. Keseluruhan bab yang ada menggambarkan alur pemikiran dalam penelitian ini. Adapun sistematika penelitian ini sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini didalamnya menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini bersifat tentang landasan dalam penelitian yang digunakan oleh peneliti. Berisi tentang kerangka teori, penelitian terdahulu dan teori-teori yang digunakan untuk mendukung variabel dalam skripsi ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode yang digunakan dalam penulisan skripsi, yang berisi tentang jenis dan sumber data, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, variabel penelitian, dan pengukuran, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang deskripsi objek penelitian yang terdiri dari deskriptif data penelitian dan responden, uji validitas dan reabilitas, deskripsi variabel penelitian, hasil analisis data dan hipotesa, pembahasan dan penilaian deskriptif responden terhadap masing-masing variabel.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan penutup dalam skripsi ini yang berisi tentang saran-saran, kesimpulan dari hasil analisis data yang dapat dijadikan masukan dan pertimbangan oleh pihak-pihak yang berkaitan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pendapatan

Dalam kamus besar bahasa indonesia pendapatan adalah hasil kerja(usaha atau sebagainya).⁸ Menurut Winardi pendapatan adalah hasil yang berupa uang atau hasil materi lainnya yang dicapai dari penggunaan kekayaan jasa manusia bebas.⁹ Pendapatan seseorang juga dapat didefinisikan sebagai banyaknya penerimaan yang dinilai dengan satuan mata uang yang dapat dihasilkan seseorang atau suatu bangsa dalam periode tertentu. Reksoprayitno mendefinisikan: “Pendapatan dapat diartikan sebagai total penerimaan yang diperoleh pada periode tertentu”. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah sebagai jumlah penghasilan yang diterima oleh para anggota masyarakat untuk jangka waktu tertentu sebagai balas jasa atau faktor-faktor produksi yang telah disumbangkan¹⁰

Pendapatan masyarakat adalah penerimaan dari gaji atau balas jasa dari hasil usaha yang diperoleh individu atau kelompok rumah tangga dalam satu bulan dan digunakan untuk

⁸Departemen pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia(jakarta: Balai Pustaka, 1998), hlm 185

⁹ Winardi, “*Ekonomi dan Koperasi*” Bandung: Exsacta 1993, h. 245

¹⁰ Reksoprayitno, sistem ekonomi dan demokrasi ekonomi, jakarta: Bina Grafika, 2004 hlm 79

memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan pendapatan dari usaha sampingan adalah pendapatan tambahan yang merupakan penerimaan lain dari luar aktifitas pokok atau pekerjaan pokok. Pendapatan sampingan yang diperoleh secara langsung dapat digunakan untuk menunjang atau menambah pendapatan pokok.

Soekartiwi¹¹ menjelaskan pendapatan akan mempengaruhi banyaknya barang yang dikonsumsi, bahwa seiring kali dijumpai dengan bertambahnya pendapatan, maka barang yang dikonsumsi bukan saja bertambah, tapi juga kualitas barang tersebut ikut menjadi perhatian. Misalnya sebelum adanya kualitas yang kurang baik, akan tetapi setelah adanya penambahan pendapatan maka konsumsi beras menjadi kualitas yang lebih baik.

Menurut Undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang PPh (Pajak Penghasilan) pasal 4 ayat 1 penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

¹¹ Soekartiwi, faktot-faktor produksi, jakrta salemba empat 2002 hlm

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa, yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, semua pembayaran atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan, seperti upah, gaji, preemisi asuransi jiwa, asuransi kesehatan yang dibayar oleh pemberi kerja atau imbalan dalam bentuk lainnya adalah objek pajak. Pengertian imbalan dalam bentuk lainnya termasuk dalam bentuk natura yang pada hakekatnya merupakan penghasilan.
2. Hadiah dari undian, atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan. Dalam pengertian hadiah, termasuk hadiah dari undian, pekerjaan dan kegiatan seperti hadiah undian tabungan, hadiah dari pertandingan olah raga dll sebagainya. Yang dimaksud dengan penghargaan adalah imbalan yang diterima sehubungan dengan penemuan benda-benda purbakala.¹²

Salah satu penyebab utama wajib pajak tidak patuh adalah faktor penghasilan wajib pajak. Saat muncul kewajiban pajak terhadap wajib pajak tersebut, maka akan

timbul masalah antara pemenuhan kepentingan pribadi dengan kepentingan sebagai warga negara atau lebih tepatnya kepentingan Negara dan sering kali kepentingan pribadi yang

¹² www.ketentuan.pajak.go.id diakses pada tanggal 26 Januari 2019

diutamakan.¹³ Dalam pemungutan pajak perlu memperhatikan kemampuan wajib pajak dalam membayar pajak, kemampuan bayar itu sendiri dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, oleh karena itu pajak harus dipungut pada saat yang tepat yaitu pada saat wajib pajak mempunyai uang.¹⁴

2.1.1 Jenis sumber pendapatan

Menurut Gilarso jenis pendapatan yang diperoleh seseorang dikategorikan menjadi:¹⁵

1. Penghasilan pokok yaitu penghasilan yang diperoleh dari upah sebagai kerja pokok
2. Penghasilan tambahan yaitu penghasilan yang diperoleh dari luar penghasilan pokok
3. Penghasilan lain-lain yaitu penghasilan yang diperoleh dari luar penghasilan pokok dan tambahan.

Sumber penghasilan keluarga berasal dari:

1. Penghasilan dari pekerjaan yaitu penghasilan yang diperoleh dari suatu pekerjaan misalnya guru, dokter, notaris, akuntan dan sebagainya.
2. Penghasilan dari modal yaitu pendapatan yang diperoleh dari harta yang dikerjakan sendiri

¹³ Devano dan siti Kurnia Rahayu, “*Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*,” Jakarta: Kencana Prenada”, 2006, h. 120

¹⁴ Rochmat Soemitro, “*Asas dan Dasar Perpajakan*”, Bandung: Eresco 1987, h. 26

¹⁵ *Ibid.*, h. 40

3. Penghasilan dari kegiatan usaha yaitu penghasilan yang diperoleh dari hadiah, pembebasan hutang.

Sedangkan Menurut Sumardi, pendapatan dilihat dari tiga sumber pendapatan yaitu:¹⁶

- a. Pendapatan yang berasal dari sektor formal yaitu gaji yang diperoleh secara tetap, biasanya berupa gaji bulanan atau gaji mingguan.
- b. Pendapatan yang berasal dari sektor informal yaitu berupa pendapatan tambahan yang berasal dari berasal dari tukang buruh atau pedagang.
- c. Pendapatan berasal dari sektor subsistem yaitu pendapatan yang diperoleh dari usaha sendiri berupa tanaman, ternak, dan pemberian orang lain.

2.1.2 Faktor yang mempengaruhi pendapatan

Menurut Suwardjono, faktor-faktor yang mempengaruhi penghasilan adalah:¹⁷

- a. Modal atau pendanaan (*financing*) yang mengakibatkan adanya tambahan dana
- b. Uang dari penjualan aktiva yang berupa produk perusahaan seperti aktiva tetap
- c. Hadiah sumbangan atau temuan

¹⁶ *Ibid* h. 16-17

¹⁷ Rimsky K Judisseno, "*Perpajakan*" Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001, h. 257

d. Penyerahan produk perusahaan berupa hasil atau penyerahan jasa

Sedangkan faktor yang mempengaruhi penghasilan menurut safir senduk antara lain:¹⁸

1) Pendidikan

Statistik menunjukkan, orang yang menempuh pendidikan lebih tinggi cenderung menghasilkan lebih banyak uang dari pada mereka yang tidak. Ini seringkali ‘membutakan’ mata masyarakat yang akhirnya cenderung menganggap bahwa seseorang tidak akan mendapatkan penghasilan tinggi sebelum mereka menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Pendidikan yang tinggi bisa membantu seseorang untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar, meski hal itu bukan satu-satunya jaminan.

2) Pekerjaan

Penghasilan seseorang juga berkait erat dengan pekerjaan yang dia lakukan, dengan istilah *white collar* dengan *blue collar worker*. Pekerja kerah putih (mereka yang lebih banyak menggunakan pikirannya dalam bekerja) biasanya menghasilkan

¹⁸ Khoirul Mustofa, “*Pengaruh Penghasilan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Tembalang*”, Skripsi, UNNES, 2011, h. 40

lebih banyak uang dari pada mereka yang berkerah biru (mereka lebih banyak menggunakan tenaganya).

3) Umur

Penghasilan seseorang juga berkait erat dengan umurnya. Mereka yang masih berumur 25 tahun ke bawah cenderung berpenghasilan lebih rendah dari pada mereka yang sudah berumur diatas 25 tahun, bahkan diatas 35 tahun. Semakin tua umur seseorang, biasanya penghasilannya akan menjadi lebih tinggi.

4) Harta

Penghasilan seseorang pada dasarnya didapat dari upah dan juga hasil investasi. Upah terdiri atas honor dan gaji, yang didapat seseorang karena jasa atau pekerjaan yang dia lakukan. Semakin besar harta yang di miliki, semakin besar pula penghasulan bunganya atau hasil investasinya. Jadi semakin besar harta, biasanya akan semakin besar pula penghasilan yang diterima. Kemudian penghasilan atau pendapatan yang diperoleh tersebut bisa digunakan untuk memperbesar harta, yang pada akhirnya bisa digunakan untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar.

5) Tempat tinggal

Tempat tinggal juga berpengaruh pada penghasilan seseorang. Apabila seseorang berada pada tempat yang strategis ia akan mampu mengubah atau meningkatkan pendapatan yang diperolehnya. Oleh sebab itu, antara tempat yang satu dengan tempat yang lain mungkin berbeda pendapat.

2.2. **Religiusitas**

Religiusitas merupakan nilai-nilai agama yang dianut oleh seseorang. Semua agama umumnya memiliki tujuan yang sama dalam mengontrol perilaku yang baik dan menghambat perilaku buruk. Agama diharapkan memberikan kontrol internal untuk pemantauan diri penegakan dalam perilaku moral (Anderson & Tollison, 1992). Komitmen agama digunakan sebagai variabel kunci untuk mengukur tingkat religiusitas individu berdasarkan pada penerapan nilai-nilai agama, keyakinan dan praktek dalam kehidupan sehari-hari.

Thomas dan Dalton (1989) menyatakan bahwa banyak orang mengandalkan nilai agama sebagai sumber moralitas untuk membentuk sikap dan perilaku mereka. Menurut Pope dan Mohdali (2010) bahwa faktor religiusitas merupakan faktor yang sangat menentukan perilaku seseorang dalam membayar

pajak.¹⁹ Religiusitas menurut definisi Johnson et al. (2001) adalah “the extent to which an individual is committed to the religion he or she professes and its teachings, such that individual attitudes and behaviour reflect this commitment”. Religiusitas menurut Johnson dipandang sebagai sejauh mana individu berkomitmen terhadap agamanya serta keimanan dan menerapkan ajarannya, sehingga sikap dan perilaku individu mencerminkan komitmen ini. Worthington et al. (2003), menyebut religiusitas atau komitmen beragama sebagai “the degree to which a person adheres to his/her religious values, beliefs and practices, and uses them in daily living”. Religiusitas atau komitmen beragama dibagi menjadi dua jenis komitmen yaitu keagamaan intrapersonal yang berasal dari keyakinan dan sikap individu, dan komitmen agama interpersonal yang berasal dari keterlibatan individu dengan komunitas atau organisasi keagamaan.²⁰

Harun Nasution merunut pengertian agama berdasarkan asal kata yaitu al Din, *religi* (*relegere, religare*) dan agama. Kemudian dalam bahasa Arab, kata itu mengandung arti menguasai, menundukkan, patuh, utang, balasan, kebiasaan. Kata *religi* atau *relegere* berarti mengumpulkan dan membaca.

¹⁹ Yesi Mutiara Basri dan Raja Adri Satriawan Surya, “*Pengaruh Keadilan, Norma Ekspektasi, Sanksi dan Religiusitas Terhadap Niat dan Ketidakpatuhan Pajak, universitas riau*”, vol VII no 3, 2014

²⁰ Andika utama dan Budi Wahyudi, “*Pengaruh Religiusitas terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Provinsi DKI Jakarta*” no 2, 2016 h.2

Kemudian *religare* berarti mengikat. Adapun kata agama terdiri dari a = tidak; gam = pergi) mengandung arti tidak pergi, tetap di tempat atau diwarisi turun temurun.²¹

Secara definitif, menurut Harun Nasution yang dikutip oleh Jalaluddin dalam bukunya Psikologi Islam, agama adalah :

- a. Pengakuan terhadap adanya hubungan manusia dengan kekuatan gaib yang harus dipatuhi.
- b. Pengakuan terhadap adanya kekuatan gaib yang menguasai manusia.
- c. Mengikat diri pada suatu bentuk hidup yang mengandung pengakuan pada suatu sumber yang berada di luar diri manusia dan yang mempengaruhi perbuatan-perbuatan manusia.
- d. Kepercayaan pada suatu kekuatan gaib yang menimbulkan cara hidup tertentu.
- e. Suatu sistem tingkah laku (*code of conduct*) yang berasal dari sesuatu kekuatan gaib.
- f. Pengakuan terhadap adanya kewajiban-kewajiban yang diyakini bersumber pada suatu kekuatan gaib.
- g. Pemujaan terhadap kekuatan gaib yang timbul dari perasaan lemah dan perasaan takut terhadap kekuatan misterius yang terdapat dalam alam sekitar manusia.

²¹ Jalaluddin, *Psikologi Agama*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012, h. 12-13.

h. Ajaran-ajaran yang diwahyukan Tuhan kepada manusia melalui seorang Rasul.²²

Sidi Gazalba, dalam memberikan deskripsi tentang pengertian agama atau religi, menjelaskan sebagai berikut : *Religi* adalah kecenderungan rohani manusia, yang berhubungan dengan alam semesta, nilai yang meliputi segalanya, makna yang terakhir, hakikat dari semuanya itu. *Religi* mencari nilai dan makna dalam sesuatu, yang berbeda sama sekali dari segala sesuatu yang dikenal, karena itulah dikatakan bahwa *religi* itu berhubungan dengan yang kudus. Manusia mengakui adanya dan bergantung mutlak pada yang kudus, yang dihayati sebagai tenaga di atas manusia dan di luar kontrolnya, untuk mendapatkan pertolongan daripadanya, manusia dengan cara bersama-sama menjalankan ajaran, upacara, dan tindakan dalam usahanya itu.²³

Religiusitas adalah suatu kesatuan unsur yang komprehensif, yang menjadikan seseorang disebut sebagai orang yang beragama (*being religious*), dan bukan sekedar mengaku mempunyai agama (*having religious*). Religiusitas meliputi pengetahuan agama, pengalaman agama, perilaku (moralitas) agama, dan sikap sosial keagamaan. Dalam Islam, religiusitas pada garis besarnya tercermin dalam pengamalan

²² *Ibid.*, h. 13.

²³ *Ibid.*, h. 41-42.

akidah, syari'ah dan akhlak. Atau dengan ungkapan lain : iman, Islam dan ihsan. Bila semua unsur di atas telah dimiliki oleh seseorang, maka dapat dikatakan bahwa individu tersebut merupakan insan beragama yang sesungguhnya.

Apapun istilah yang digunakan oleh para ahli untuk menyebut aspek religius di dalam diri manusia. Menunjuk kepada suatu fakta bahwa kegiatan-kegiatan religius itu memang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Di dalamnya terdapat berbagai hal menyangkut moral atau akhlak, serta keimanan dan ketaqwaan seseorang. Agama dalam kehidupan individu berfungsi sebagai suatu sistem nilai yang memuat norma-norma tertentu. Secara umum norma-norma tersebut menjadi kerangka acuan dalam bersikap dan bertindak laku agar sejalan dengan keyakinan agama yang dianutnya. Sebagai sistem nilai agama memiliki arti yang khusus dalam kehidupan individu serta dipertahankan sebagai bentuk ciri khas.

Pada diri manusia telah ada sejumlah potensi untuk memberi arah dalam kehidupan manusia. Potensi tersebut adalah : *hidayat al-ghariziyyat* (naluriyah), *hidayat al-hissiyat* (inderawi), *hidayat al-aqliyyat* (nalar) dan *hidayat al-Diniyyat* (agama). Semua itu merupakan potensi fitrah yang dibawa sejak lahir. Pengaruh lingkungan terhadap seseorang adalah memberi bimbingan kepada potensi yang dimilikinya itu. Dari hal tersebut, maka pengaruh agama dalam kehidupan individu

adalah memberi kemantapan batin, rasa bahagia, rasa terlindung, rasa sukses dan rasa puas. Perasaan positif ini lebih lanjut akan menjadi pendorong untuk berbuat. Agama dalam kehidupan individu selain menjadi motivasi dan nilai etik juga merupakan harapan. Motivasi mendorong seseorang untuk berkreasi, berbuat kebajikan maupun berkorban, sedangkan nilai etik mendorong seseorang untuk berlaku jujur, menepati janji, menjaga amanat, dan sebagainya. Harapan mendorong seseorang untuk bersikap ikhlas, menerima cobaan yang berat atupun berdo'a. Sikap seperti itu akan lebih terasa secara mendalam jika bersumber dari keyakinan terhadap agama.²⁴

Menurut Glock & Stark seperti yang dikutip oleh Djamaluddin Ancok dan Fuad Nashori, terdapat lima macam dimensi keagamaan, yaitu:²⁵

- a. Dimensi Keyakinan (Ideologi)
- b. Dimensi Peribadatan atau Praktek Agama (Ritualistik)
- c. Dimensi Pengamalan
- d. Dimensi Ihsan (Penghayatan)
- e. Dimensi Pengetahuan²⁶

²⁴ *Ibid.*, h. 256-257.

²⁵ Nashori, Fuad dan Mucharam, R.D, *Mengembangkan Kreativitas Dalam Perspektif Psikologi Islami*, Yogyakarta: Menara Kudus, 2002, h. 78-82.

²⁶ Ancok dan Suroso, *Psikologi Islami*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2011, h. 79.

2.3. Kepatuhan Wajib Pajak

Arti patuh dalam kamus Bahasa Indonesia, patuh adalah suka menurut (perintah).²⁷ Menurut Simon James sebagaimana yang dikutip oleh Gunadi, pengertian kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, atau penerapan atau ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi²⁸

Kepatuhan Pajak merupakan persoalan laten dan aktual yang sejak dulu ada di perpajakan. Di dalam kepatuhan dan ketaatan secara kongkret berarti adanya kesediaan untuk mematuhi, menghormati dan adanya kemampuan melaksanakan suatu sistem nilai yang mengharuskan seseorang tunduk pada putusan, perintah atau peraturan yang berlaku di masyarakat khususnya di lingkungan kerja masing-masing.

Kepatuhan wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakan merupakan salah satu ukuran kinerja wajib pajak di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Pajak. Artinya, tinggi rendahnya kepatuhan WP akan menjadi dasar pertimbangan Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan pembinaan, pengawasan, pengelolaan, dan tindak lanjut terhadap WP.

²⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2008, h. 1134

²⁸ Gunadi, *Indonesia Taxation 2002*, A Reference Guide, Jakarta: Multi Utama Publishing.

Selain itu, mengelola perpajakan melalui administrasi perpajakan yang baik juga merupakan bagian dari etika bisnis dan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance, GCG*).Selanjutnya, kinerja perpajakan wajib pajak yang memperoleh status baik dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak akan diberikan predikat sebagai wajib pajak Patuh Menurut Safri Nurmantu sebagaimana yang dikutip oleh Widi Widodo, ada dua macam kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Selanjutnya kepatuhan formal dan kepatuhan material diuraikan sebagai berikut:

a. Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan yang berlaku. Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak secara formal dapat dilihat dari aspek kesadaran Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri, ketepatan waktu Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan, ketepatan waktu dalam membayar pajak, dan pelaporan Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak dengan tepat waktu. Dalam hal ini kepatuhan formal meliputi:

- Wajib pajak membayar dengan tepat waktu
- Wajib pajak membayar dengan tepat jumlah
- Wajib pajak tidak memiliki tanggungan pajak bumi dan

bangunan.

b. Kepatuhan Material

Kepatuhan Material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substansif (hakekat) memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal. Jadi wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material dalam mengisi SPT PPh, adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, baik dan benar atas SPT tersebut sehingga sesuai dengan ketentuan dalam Undang Undang perpajakan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu.²⁹

Kriteria sebagai wajib pajak patuh sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 17 C ayat (2) UU KUP dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), meliputi:
 - Penyampaian SPT Tahunan tepat waktu dalam 3 tahun terakhir.
 - Penyampaian SPT Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk masa pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 masa pajak untuk setiap jenis pajak

²⁹ Widi Widodo, *Moralitas, Budaya...*, h. 68-70.

dan tidak berturut-turut.

- SPT Masa yang terlambat tersebut telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa pada Masa Pajak berikutnya.
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak dengan keadaan pada tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai wajib pajak patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- c. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut. Laporan keuangan harus disusun dalam bentuk panjang (long form report), dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial serta fiskal bagi wajib pajak yang wajib menyampaikan SPT tahunan PPh. Pendapat akuntan atas laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik yang tidak sedang dalam pembinaan lembaga pemerintah pengawas akuntan publik.
- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5

tahun terakhir³⁰

Kepatuhan wajib pajak dikemukakan oleh Norman D Nowak sebagai “suatu iklim” kepatuhan kewajiban dan perpajakan tercermin dalam situasi dimana :

- Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua. ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
- Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
- Membayar pajak terutang tepat pada waktunya.³¹

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak (Rahayu, 2010) yaitu:

- a. Faktor pendidikan wajib pajak, yang meliputi pendidikan formal dan pengetahuan wajib pajak
- b. Faktor pendapatan wajib pajak, yang meliputi besarnya pendapatan bersih wajib pajak dari pekerjaan pokok dan sampingannya, serta jumlah anggota keluarga yang masih harus dibiayai.
- c. Faktor pelayanan aparat pajak, disaat pelayanan penyampaian informasi, pelayanan pembayaran, maupun pelayanan keberatan dan penyaranan.

³⁰ *Ibit* h. 245

³¹ *Ibit* h.200

- d. Faktor penegakan hukum pajak, yang terdiri dari saksi-saksi, keadilan dalam penentuan jumlah pajak yang dipungut, pengawasan dan pemeriksaan.
- e. Faktor sosialisasi diantaranya pelaksanaan sosialisasi dan media sosialisasi.³²

2.4. Pajak

2.4.1 Pengertian Pajak

Arti pajak dalam kamus Bahasa Indonesia, pajak adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yg harus dibayar oleh penduduk sbg sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, jual beli barang dan sebagainya.³³ Arti pajak menurut Rochmat S oemitro sebagaimana dikutip oleh Tony Marsyahrul, bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. “dapat dipaksakan” mempunyai arti, apabila utang pajak tidak dibayar, utang tersebut dapat ditagih

³² Carola Ditta Surya Putri, *Analisis Pengaruh Pengetahuan Umum, Tingkat Ekonomi, Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Pbb Masyarakat Desa Dan Kota Dengan Variabel Moderating Kontrol Petugas Desa/Kelurahan (Studi Kasus Pada Kabupaten Demak)*, fak ekonomi, universitas diponegoro, tahun 2013 h 36

³³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2008, h. 1104

dengan kekerasan, seperti surat paksa, sita, lelang, dan sandera.

Menurut Adriani sebagaimana dikutip oleh Gus Fahmi, mendefinisikan pajak sebagai iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.³⁴

Sedangkan menurut Rochmat Soemitro sebagaimana dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati dalam Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan merumuskan Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara (peralihan kekayaan dari sector partikulir ke sektor pemerintahan) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegenprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran.

Pencantuman definisi pajak dalam UU baru terjadi pada tahun 2007, setelah diundangkannya UU No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU

³⁴ Gus fahmi *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 2011.h. 24.

No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). UU ini mendefinisikan bahwa : Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan *yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*. Dalam definisi ini ditekankan bahwa pajak adalah “kontribusi” rakyat, bukan lagi kepada negara “iuran wajib”, bisa dipaksakan dan ditujukan untuk keperluan negara.³⁵

2.4.2 Fungsi Pajak

Fungsi pajak adalah kegunaan pokok, manfaat pokok pajak. Umumnya dikenal dengan 2 macam fungsi pajak yaitu fungsi *budgetair* dan fungsi *regulerend* yaitu:

1. Fungsi *Budgetair*

Fungsi *Budgetair* ini merupakan fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal (*fiscal function*), yaitu pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara yang dilakukan sistem pemungutan berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku.

³⁵ *Ibit* h.25

2. Fungsi *Regulerend*

Fungsi *regulerend* disebut juga fungsi mengatur atau fungsi tambahan, yaitu pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya adalah pemungutan PPnBM untuk penjualan barang mewah, kebijakan ini ditetapkan pemerintah dalam rangka mengatur pola konsumsi masyarakat.³⁶

2.4.3 Tarif Pajak

Sebagai mana telah diuraikan pada paragraf-paragraf sebelumnya, diketahui bahwa pemerintah dalam memungut pajak tidak lepas dari rasa keadilan. Hal ini menciptakan keseimbangan sosial dan pada akhirnya akan mensejahterakan masyarakat dalam suatu negara. Adil dapat diartikan bahwa pemungutan pajak harus umum dan merata. Ini bertujuan agar semua wajib pajak memperoleh tekanan yang sama dalam pembayaran pajak. Ada beberapa macam tarif dalam pemungutan pajak, yaitu:

1. Tarif Marginal

Presentase tarif ini berlaku untuk suatu kenaikan dasar pengenaan pajak. Tarif ini bisa

³⁶ *ibid*, h. 3-4.

dikenal dengan tarif umum. Adapun yang termasuk dalam tarif marginal adalah:

- a. Tarif pasal 17 UU No. 36/2008 tentang pajak penghasilan. Tarif ini dilakukan atas pajak pegawai tetap dan pajak atas laba usaha.
 - b. Tarif Final. Tarif ini terbagi atas tarif final penghasilan bruto yaitu dikenakan dari penghasilan yang bersumber dari APBN/APBD maupun PNPB serta atas tarif final penghasilan neto seperti tarif profesi, dokter, pengacara dan lain-lain seperti tertuang dalam tarif normatif yang dikeluarkan Dirjen Pajak maupun penghasilan bruto kurang dari 1 (satu) miliar.
2. Tarif Efektif Rata-rata (TER)

Presentase tarif pajak yang efektif berlaku atau harus diterapkan atas dasar pengenaan pajak tertentu. Tarif ini biasanya dikenakan kepada wajib pajak yang memiliki usaha lebih dari satu jenis usaha.³⁷

2.4.4 Sistem dalam Pemungutan Pajak

Terdapat tiga sistem dalam melakukan pemungutan pajak, yaitu:

³⁷ Drs. Nurdin Hidayat, M.M M.SI dan Dr. Dedi Purwana Es., M.Bus, Perpajakan Teori dan Praktek, PT raja grafindo persada, jakarta, 2017 h 16

1. Stelsel nyata (riil)

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (dalam hal yang menjadi Objek Pajak Penghasilan adalah penghasilan).

2. Stelsel anggapan (fiktif)

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang.

3. Stelsel campuran

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. kombinasi ini mengharuskan Wajib Pajak menghitung kembali pajak terutanganya pada akhir tahun sesuai dengan penghasilan sesungguhnya yang diperoleh pada akhir tahun.³⁸

2.4.5 Kedudukan Hukum Pajak

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, kewenangan pemungutan pajak itu berada ditangan pemerintah. Dinegara hukum seperti indonesia segala sesuatu harus diterapkan dalam bentuk perundang-undangan. Oleh katrena itu pemunngutan pajak diindonesia diatur dalam pasal 23 ayat (2) undang-

³⁸ *Ibit* h. 146-147.

undang dasar 1945, yang menyebutkan bahwa pengenaan dan pemungutan pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Itu karena pajak merupakan peralihan kekayaan dari masyarakat kepada pemerintah. Peralihan kekayaan dapat terjadi karena hibah atau kemungkinan adanya peristiwa perampasan. Oleh karena itu, pembebanan kepada rakyat seperti halnya pajak harus diterapkan melalui UU dengan pengesahan dewan perwakilan rakyat (DPR).³⁹

2.4.6 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak yang dikenakan atas objek pajak bumi dan bangunan yang diatur pengenaannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Yang dimaksud dengan istilah-istilah menurut Pasal 1 UU No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994 adalah sebagai berikut:

1. Bumi. Yang dimaksud Bumi dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan adalah permukaan bumi dan tubuh

³⁹ Drs. Nurdin Hidayat, M.M M.SI dan Dr. Dedi Purwana Es., M.Bus, *Perpajakan Teori dan Praktek*, h 18

bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak pengairan) serta laut wilayah Republik Indonesia.

2. Bangunan. Yang dimaksud bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan untuk tempat tinggal, tempat usaha, dan tempat yang diusahakan.
3. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Yang dimaksud dengan Nilai Jual Objek Pajak adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, nilai jual objek pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru atau nilai jual objek pajak pengganti.
4. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP). Yang dimaksud dengan Surat Pemberitahuan Objek Pajak adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data objek pajak menurut ketentuan undang-undang.
5. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Yang dimaksud dengan Surat Pemberitahuan Pajak

Terutang adalah surat yang digunakan oleh direktorat jenderal pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terutang kepada Wajib Pajak.⁴⁰

2.4.7 Asas Pajak Bumi dan Bangunan

Asas Pajak Bumi dan Bangunan adalah :

- a. Memberikan kemudahan dan kesederhanaan
- b. Adanya kepastian hukum
- c. Mudah dimengerti dan adil
- d. Menghindari pajak berganda.⁴¹

2.4.8 Subjek Pajak bumi dan bangunan

Menurut Mardiasmo, berikut yang menjadi subjek pajak yaitu :

1. Yang menjadi Subjek pajak dalam PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Dengan demikian tanda pembayaran/pelunasan pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak.
2. Subjek pajak yang dimaksud dalam no. 1 yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi wajib pajak.

⁴⁰ Drs. Nurdin Hidayat, M.M M.SI dan Dr. Dedi Purwana Es,. M.Bus, *Perpajakan Teori dan Praktek*, h 10

⁴¹ *Ibit* h.331.

3. Dalam hal atas suatu objek pajak belum jelas diketahui wajib pajaknya, Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam no. 1 sebagai wajib pajak. Hal ini berarti memberikan kewenangan kepada Dirjen Pajak untuk menentukan subjek wajib pajak, apabila suatu objek pajak belum jelas wajib pajaknya.
4. Subjek pajak yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam no. 3 dapat memberikan keterangan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Pajak bahwa ia bukan wajib pajak terhadap objek pajak dimaksud.
5. Bila keterangan yang diajukan oleh wajib pajak dalam no. 4 disetujui, maka Direktorat Jenderal Pajak membatalkan penetapan sebagai wajib pajak sebagaimana dalam no. 3 dalam jangka waktu satu bulan sejak diterimanya surat keterangan dimaksud.
6. Bila keterangan yang diajukan itu tidak disetujui, maka Dirjen Pajak mengeluarkan surat keputusan penolakan dengan disertai alasan-alasannya.
7. Apabila setelah jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterimanya keterangan sebagaimana no. 4 Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan keputusan maka keterangan yang diajukan itu dianggap disetujui. Apabila Direktur Jenderal Pajak

tidak memberikan keputusan dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya keterangan dari wajib pajak, maka ditetapkan sebagai wajib pajak gugur dengan sendirinya dan berhak mendapatkan keputusan pencabutan penetapan sebagai wajib pajak.⁴²

2.4.9 Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Mardiasmo, berikut yang menjadi objek pajak yaitu :

1. Yang menjadi objek pajak adalah bumi atau bangunan.
2. Yang dimaksud dengan klasifikasi bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman, serta untuk memudahkan penghitungan pajak yang terutang. Dalam menentukan klasifikasi bumi atau tanah diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:
 - a. Letak
 - b. Peruntukan
 - c. Pemanfaatan
 - d. Kondisi lingkungan dan lain-lain

Dalam menentukan klasifikasi bangunan

⁴² Ahmad Tjahjono dan Triyono Wahyudi, *Perpajakan Indonesia: Pendekatan Soal Jawab dan Kasus*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2005, h. 345-347.

diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Bahan yang digunakan
- b. Rekayasa
- c. Letak
- d. Kondisi lingkungan dan lain-lain

Menurut Mardiasmo, objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah objek pajak yang:

- a. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dan tidak untuk mencari keuntungan, antara lain:
 - 1) Di bidang Ibadah, contoh: masjid, gereja, vihara
 - 2) Di bidang kesehatan, contoh : rumah sakit
 - 3) Di bidang pendidikan, contoh : madrasah, pesantren
 - 4) Di bidang sosial, contoh : panti asuhan
 - 5) Di bidang kebudayaan nasional, contoh : museum, candi
- b. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu.
- c. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan atau tanah negara yang belum dibebani suatu hak.

- d. Digunakan perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
- e. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.⁴³

2.5. Dasar Pengenaan Pajak

Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Besarnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) ditetapkan setiap tiga tahun sekali oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak atas nama Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan pendapat Gubernur/Bupati /Walikota (Pemerintah Daerah) setempat serta memperhatikan asas self assement. Yang dimaksud (assessment value) adalah nilai jual yang dipergunakan sebagai dasar penghitungan pajak, yaitu suatu persentase tertentu dari nilai jual sebenarnya. Dasar penghitungan pajak adalah yang ditetapkan serendahrendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Untuk perekonomian sekarang ini, terutama untuk tidak terlalu membebani wajib pajak di daerah pedesaan, tetapi dengan tetap memperhatikan penerimaan, khususnya bagi Pemerintah Daerah, maka telah ditetapkan besarnya persentase untuk menentukan besarnya NJKP, yaitu:

1. Sebesar 40% dari NJOP untuk:

⁴³ *ibid*, h.331.

- a. Objek Pajak perkebunan
 - b. Objek Pajak Kehutanan Objek Pajak lainnya, yang Wajib Pajaknya perorangan dengan NJOP atas bumi dan bangunan sama atau lebih besar dari 1 Miliar rupiah.
2. Sebesar 20% dari NJOP untuk:
- a. Objek Pajak Pertambangan
 - b. Objek Pajak lainnya yang NJOP-nya kurang dari Rp 1.000.000.000,00⁴⁴

Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengkalikan tarif pajak dengan NJKP, dengan rumus

$$\text{Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)} = \text{tarif pajak} \times \text{NJKP} \\ = 0.5\% \times [\text{persentase NJKP}(\text{NJOP}-\text{NJOPTKP})]$$

2.5.1 Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pada dasarnya pembayaran PBB dapat dilakukan oleh setiap wajib pajak melalui 4 cara sebagai berikut:

- a. Pembayaran langsung ke Bank/Kantor Pos Tempat Pembayaran Cara pembayaran ini dilakukan oleh wajib pajak ke Bank/Kantor Pos Tempat pembayaran yang tercantum di dalam SPPT PBB, kemudian membayar di loket pembayaran dan menerima STTS yang telah dibubuhi tanda lunas pembayaran PBB dari Bank/Kantor Pos tempat pembayaran tersebut.

⁴⁴ *Ibit*, h. 337-338.

Suatu kebiasaan yang buruk dari wajib pajak di Indonesia adalah bahwa mereka selalu membayar pajak pada saat jatuh tempo, sehingga terjadi antrian yang panjang dalam pembayaran di Bank/Kantor Pos tempat pembayaran.

- b. Pembayaran menggunakan mekanisme pengiriman uang/transfer Cara ini dilakukan oleh wajib pajak yang kebetulan tempat domisili wajib pajak berbeda dengan lokasi objek pajak. Misalnya wajib pajak berdomisili di Jakarta sedangkan objek pajak berlokasi di Medan. Dalam hal ini wajib pajak dapat melakukan pembayaran dengan cara mengirimkan uang tunai baik melalui Bank ataupun Kantor Pos di Jakarta ke Bank/Kantor Pos tempat pembayaran PBB di Medan dengan mencantumkan nama rekening tempat pembayaran yaitu rekening Kas Negara qq. Penerimaan PBB di Medan. Mekanisme transfer ini juga dapat menggunakan pemindahan uang melalui pemindahbukuan antar rekening yaitu melalui rekening wajib pajak di Bank di Jakarta misalnya, ke rekening Kas Negara qq. Penerimaan PBB pada Bank tempat pembayaran di Medan.
- c. Pembayaran PBB melalui Petugas Pemungut Cara ini dilakukan pada daerah-daerah terpencil dan jauh dari

lokasi Bank/Kantor Pos tempat pembayaran sehingga menyulitkan masyarakat apabila akan membayar di Bank tempat pembayaran. Petugas pemungut biasanya ditunjuk oleh Camat atau Lurah untuk memungut PBB dari para wajib pajak. Dalam hal ini bukti pembayaran yang dibawa oleh petugas pemungut adalah Tanda Terima Sementara (TTS) yang harus diberikan kepada wajib pajak segera setelah wajib pajak membayar melalui petugas pemungut tersebut. Kemudian dalam kurun waktu 1x24 jam petugas pemungut harus menyetor uang PBB yang telah dipungutnya ke Bank/Kantor Pos tempat pembayaran yang tercantum di dalam SPPT PBB. Setelah menyetor ke Bank/Kantor Pos tempat pembayaran, petugas pemungut akan menerima STTS asli dari Bank/Kantor Pos tempat pembayaran kemudian menyerahkan STTS asli ini kepada wajib pajak yang telah dipungut PBBnya.

- d. Pembayaran PBB secara elektronik melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Cara pembayaran ini adalah acara yang saat ini banyak diterapkan. Selain memudahkan para wajib pajak, juga mempercepat proses pembayaran karena wajib pajak tidak perlu mengantri di loket Bank/Kantor Pos tempat

pembayaran dan ATM dari Bank/Kantor Pos Elektronik ini telah terkoneksi langsung dengan computer Kantor.

Pelayanan Pajak Pratama sehingga penerimaan PBB dapat terpantau secara real time. Di dalam formulir SPPT PBB telah dicantumkan nama Bank/Kantor Pos Elektronik yang telah terkoneksi untuk pembayaran PBB melalui ATM. Saat ini terdapat beberapa bank yang bersangkutan, terpaksa harus membayar dengan salah satu dari ke tiga cara yang telah disebutkan diatas.

Pembayaran PBB untuk sector Perdesaan dan Perkotaan dapat dilakukan oleh wajib pajak pada Bank/Kantor Pos tempat pembayaran (Bank/Kantor Pos TP) ataupun Bank/Kantor Pos tempat pembayaran Elektronik (Bank/Kantor Pos TP Elektronik) yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Penunjukan Bank/Kantor Pos TP ini oleh Menteri Keuangan telah dilimpahkan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama, sedangkan penunjukan Bank/Kantor Pos TP Elektronik dilimpahkan kepada Direktorat Jenderal Pajak Pembayaran.⁴⁵

⁴⁵ *Ibit* h. 121-123.

2.6. Pajak Dalam Islam

Terdapat kata pajak di dalam Al-Quran surat Al Taubah ayat 29:

فَتِلْكَ الْأَیُّمُومَاتُ الَّتِي لَا يُمْسِكُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ
 اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى
 يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

Artinya : “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) pada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah Dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.” (QS. Al-Taubah [9]:29.⁴⁶

Tafsirannya :

Allah swt. Dalam ayat ini memerintahkan hamba-hambaNya yang mukmin yang suci karna agamanya dan karena dirinya agar menjauhkan orang-orang musyrikin yang najis karena agama dan kepercayaan dari masjidil haram dan melarang mereka mendekatinya setelah turunnya ayat ini, yaitu pada tahun sembilan, tatkala rasulullah saw mengutus ali dan abu bakar ke makkah untuk mengumumkan bahwa tidak boleh orang musyrik

⁴⁶ Departemen Agama RI, *Alqur''an Dan , ,Terjemahannya* Bandung PT. BumiRestu, 1977, h. 282.

berhaji ke masjidil haram dan tidak boleh seorang yang telanjang berthawaf keliling ka'bah.⁴⁷

Muhammad bin ishak berkata, “orang-orang khawatir dengan adanya larangan orang-orang musyrikin mendekati masjidil haram, pasar-pasar akan menjadi sepi, perdagangan akan terhenti dan hilanglah keuntungan dan hasil yang biasanya mereka peroleh dari ramainya pengunjung masjidil haram sehingga akan menjadi miskinlah mereka disebabkan larangan firman-Nya, bahwa jika kamu khawatir jadi miskin karena larang itu, maka Allah pasti akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya sebagai pengganti yang kamu khawatirkan itu. Allah menjanjikan dalam ayat berikutnya suatu sumber penghasilan baru bagi kaum muslimin sebagai ganti yang mereka khawatirkan itu, yaitu hasil pungutan Jizyah” pajak kepala yang dipungut dari orang-orang yang bukan islam sebagai imbalan jaminan keamanan bagi diri mereka.⁴⁸

Imam syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal, bersandar kepada ayat ini sebagai dalil, berpendapat bahwa jizyah hanya dapat dipungut dari ahli kitab dan orang-orang majusi, sebagaimana telah dilakukan oleh Rosulullah SAW. Terhadap orang-orang majusi dari “Hajar”. Sedang Imam Malik berpendapat bahwa jizyah hendaklah dikenakan terhadap semua

⁴⁷ H Salim Bahreisy dan H Said Bahresaisy Tafsir Ibnu Katsir, PT Bina ilmu offiset, surabaya, 2012 h 37

⁴⁸ *Ibid* h 38

orang kafir, apakah mereka ahli kitab, majusi atau penyembah berhala. Dan demikian pula pendapat Imam Abu Hanifah dengan pengecualian bangsa arab yang hanya ahli kitabnya saja diwajibkan membayar jizyah.⁴⁹

Bagi petugas pajak, jika hukum pajak itu dibuat sesuai syariat, maka perbuatan memungut dan mendistribusikan pajak tentu akan dapat bernilai ibadah bagi pemungutnya maupun bagi wajib pajak sebagai jihat harta. Sekecil apapun perbuatan (kebaikan atau keburukan), pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt. Dan akan mendapat balasan.⁵⁰

Secara etimologi, pajak dalam bahasa arab disebut dengan istilah *dharibah*, yang berasal dari kata dasar ضرب يضر (*dharaba, yadhribu, dharban*) yang artinya: mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebankan , dll.⁵¹

Dharaba adalah bentuk kata kerja (fi'il), sedangkan bentuk kata bendanya (ism) adalah dharibah (ضريبة), yang dapat berarti beban. Dahruban adalah isim mufrad (kata benda tunggal) dengan bentuk jamaknya adalah dharaaib (ضرائب) ia disebut beban, karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasakan sebagai sebuah beban (pikulan yang berat). Dalam contoh

⁴⁹ *Ibid.*, h39

⁵⁰ *Ibid* h. 28.

⁵¹ Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir: Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya, Pustaka Progresif, 2012, Bab Dharaba, h. 815

pemakaian, jawatan perpajakan disebut dengan masalah adh-Dharaaib (مسألة الضرائب)

Secara istilah dapat diartikan dharibah sebagai padanan pajak dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa pajak itu sesungguhnya adalah beban tambahan yang ditimpakan kepada kaum Muslim setelah adanya beban pertama, yaitu zakat.⁵²

Dengan demikian, pengertian pajak (dharibah) tetaplah “beban tambahan”, yang dipikulkan kepada kaum Muslim, untuk kepentingan mereka sendiri yaitu kaum Muslim, yang tidak terpenuhi oleh Negara dari sumber-sumber yang utama, seperti Ghanimah, shadaqah (zakat dan „ushr-pertanian), fay“I (jizyah, kharaj, dan „ushrperdagangan), sumber pendapatan sekunder lainnya.

Ada tiga ulama yang memberikan definisi tentang pajak yaitu:

1. Yusuf Qardhawi

Pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada Negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari Negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasi sebagian tujuan ekonomi, social, politik, dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh Negara.

⁵² Ibid h. 30.

2. Gaziinayah

Pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan kemampuan si pemilik harta dan dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan untuk memnuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah.

3. Abdul Qadim Zallum

Pajak adalah harta yang diwajibkan Allah Swt. Kepada kau muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi Baitul Mal tidak ada uang/harta

Dapat disimpulkan dari beberapa definisi di atas, jelas terlihat bahwa pajak adalah kewajiban yang datang secara kontemporer, diwajibkan oleh Ulil Amri sebagai kewajiban tambahan sesudah zakat (jadi dharibah bukan zakat), karena kekosongan/ kekurangan Baitul Mal, dapat dihapuskan jika keadaan Baitul Mal terisi kembali, diwajibkan hanya kepada kaum muslim yang kaya, dan harus untuk kepentingan mereka (kaum muslim), bukan kepentingan umum, sebagai bentuk jihad kaum muslim

*untuk mencegah datangnya bahaya yang lebih besar jika hal itu tidak dilakukan.*⁵³

Dapat disimpulkan dari beberapa definisi di atas, jelas terlihat bahwa pajak adalah kewajiban yang datang secara kontemporer, diwajibkan oleh Ulil Amri sebagai kewajiban tambahan sesudah zakat (jadi *dharibah* bukan zakat), karena kekosongan/ kekurangan Baitul Mal, dapat dihapuskan jika keadaan Baitul Mal terisi kembali, diwajibkan hanya kepada kaum muslim yang kaya, dan harus untuk kepentingan mereka (kaum muslim), bukan kepentingan umum, sebagai bentuk jihad kaum muslim untuk mencegah datangnya bahaya yang lebih besar jika hal itu tidak dilakukan.⁵⁴

2.7. Penelitian Terdahulu

1. Khoirotul Mustofa (2011) yang berjudul Pengaruh Penghasilan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bnagunan variabel yang diteliti Penghasilan, Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghasilan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan sedangkan kesadaran wajib pajak memperoleh kriteria cukup baik dengan presentase 24,4%. Ada pengaruh positif antara penghasilan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan, hal ini

⁵³ *Ibid* h. 31.

⁵⁴ *Ibid* h. 32.

ditunjukkan dari persamaan regresi $Y = 6,561 + 0,382X_1 + 0,576X_2$ dengan $F_{hitung} = 20,302$ dan besarnya pengaruh sebesar 29,1 %,

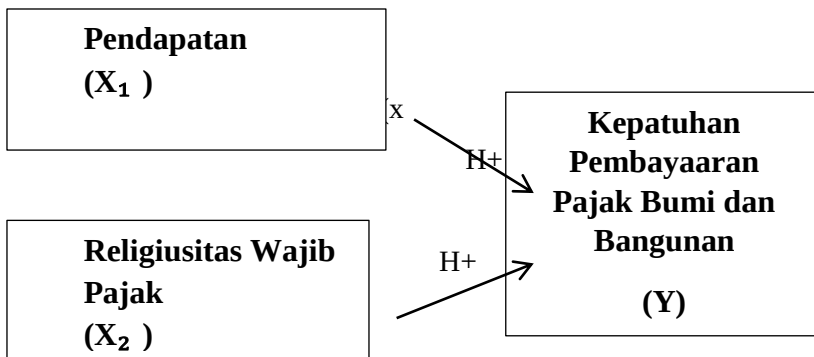
2. Ernawati (universitas Hasanudin Makassar 2014) pengaruh tingkat pendidikan, pendapatan dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. hasil uji hipotesis secara parsial (t-test) membuktikan bahwa variabel tingkat pendidikan (X_1), tingkat pendapatan (X_2), dan kualitas pelayanan fiskus (X_3) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Najla Ulfa Salsabila (2018) yang berjudul Pengaruh Religiusitas, Nasionalisme, Kepercayaan Pada otoritas, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Variabel yang diteliti Tingkat Religiusitas, Nasionalisme, Kepercayaan pada Otoritas, Tax Amnesty, Kepatuhan wajib Pajak. Hasil Tingkat religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Nasionalisme tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kepercayaan terhadap otoritas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Seto widagsono (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2017) pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi dan religusitas terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil analisi regresi variabel pengetahuan (x_1), sanksi (x_2), dan

religiusitas (x3) secara simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (y). Secara parsial (uji t) diperoleh hasil bahwa pengetahuan perpajakan (x1) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan semakin tinggi pengetahuan perpajakan maka wajib pajak akan dengan mudah memenuhi kewajiban perpajakannya. Variabel sanksi (x2) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak hal ini dikarenakan bahwa ada pandangan bahwa mendapat sanksi akan lebih banyak merugikan. Sedangkan religiusitas (x3) tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan adanya pandangan yang berbeda antara urusan akhirat dengan urusan bisnis.

5. Agus Nurfauzi (Semarang, Universitas Negeri Semarang, 2016) "*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes*". Hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil analisis deskriptif persentase menunjukkan SPPT dalam kriteria kurang baik dengan persentase 67,83%, pelayanan perpajakan kriteria baik (68,46%), kesadaran wajib pajak kriteria baik (74,50%) dan kepatuhan wajib pajak kriteria baik (79,74%). Secara simultan ada pengaruh yang signifikan dari variabel SPPT,

pelayanan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kontribusi 58,5%. Hasil pengujian hipotesis secara simultan menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima dengan harga signifikansi sebesar 0,000. Disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan baik secara parsial maupun simultan variabel SPPT, pelayanan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2.

2.8. Kerangka pemikiran



2.9. Hipotesis Penelitian yang Relevan

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap tujuan penelitian yang diturunkan dari kerangka pemikiran yang telah dibuat. Hipotesis merupakan pernyataan tentatif tentang hubungan antara beberapa dua variabel atau lebih. Hipotesis merupakan dugaan sementara dari jawaban rumusan masalah penelitian. Disini kesimpulan sementara adalah :

H1: Pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan

H2 : Religiusitas Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.³⁵

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

3.2.1 Populasi

Populasi sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.³⁶ Populasi atau universe adalah sekelompok orang, kejadian, atau benda, yang dijadikan objek penelitian.³⁷

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh masyarakat yang menjadi wajib pajak bumi dan bangunan di Desa kedungkelor tegal. Berdasarkan data yang

³⁵Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2015, h. 8.

³⁶*Ibid* h. 190.

³⁷Deni Darmawan, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2013, h. 139

diperoleh jumlah masyarakat yang membayar wajib pajak dari seluruh jumlah penduduk di desa kedungkelor adalah 1792 wajib pajak.

3.2.2 Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti. Dalam penarikan sampel penulis menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu sampling yang dipilih secara cermat dengan mengambil orang atau obyek penelitian yang selektif dan mempunyai ciri-ciri yang spesifik. Sampel yang diambil memiliki ciri-ciri yang khusus dari populasi, sehingga dapat dianggap cukup representatif.³⁸

Ciri-ciri wajib pajak yang akan dijadikan sampel diantaranya yaitu masyarakat yang bertempat tinggal di Desa Kedungkelor kec.Warureja kab.Tegal, beragama Islam atau seorang muslim, tercatat sebagai warga asli Desa Kedungkelor, berstatus sebagai wajib pajak Desa Kedungkelor, memiliki Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan lamanya menjadi wajib pajak minimal 1 tahun.

Untuk mendapatkan besaran sampel sangat tergantung dari besaran tingkat ketelitian atau kesalahan yang diinginkan peneliti. Namun dalam hal ini tingkat

³⁸ Muhammad Fauzi, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Semarang, Waliosongo Press, 2009, h. 193.

kesalahan, penelitian sosial umumnya memberi batasan tingkat kesalahannya antara 1% sampai 10% (0,1). Makin besar tingkat kesalahan, maka makin kecil sampel. Namun yang perlu diperhatikan adalah semakin besar sampel (semakin mendekati populasi), maka semakin kecil peluang kesalahan generalisasi dan sebaliknya, semakin kecil sampel (menjauhi jumlah populasi), maka besar peluang kesalahan generalisasi.³⁹

Untuk mendapatkan sampel yang menggambarkan populasi, maka dalam penelitian sampel ini digunakan formula Slovin sebagai berikut

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan :

n : jumlah sampel minimal

N : jumlah populasi keseluruhan

e : persentase kelonggaran ketelitian karena kesalahan pengambilan sampel (1%, 5%, atau 10%)⁴⁰

Dalam penelitian ini populasi (N) adalah 1792 wajib pajak, sedangkan persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan penarikan sampel (E) nya adalah 10%, yaitu 0,1.

³⁹ *Ibid* h. 193-194.

⁴⁰ Albert kurniawan, *Metode Riset Untuk Ekonomi dan Bisnis : Teori, Konsep & Praktik Penelitian Bisnis (Dilengkapi Perhitungan Pengolahan Data dengan IBM SPSS 22.0)*, Bandung, alfabeta, 2014, h. 84.

Dalam penelitian ini populasi (N) adalah 1792 wajib pajak, sedangkan persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan penarikan sampel (E) nya adalah 10%, yaitu 0,1. Jadi besarnya sampel yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

n

n

$n =$

dibulatkan menjadi 95

(Wajib

Pajak)

Dari rumus *Slovin* di atas diketahui jumlah sampel penelitian adalah sebanyak 94 Wajib Pajak sebagai responden.

3.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

3.3.1 Sumber Data

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh.⁴¹ Ada dua macam sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.⁴² Data ini diperoleh langsung dari pengisian angket oleh wajib pajak Desa Pekuncen. Data primer tersebut data mentah dengan skala Likert untuk mengetahui respon dari responden mengenai pengaruh pendapatan dan religiusitas wajib pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan desa kedungkelor kecamatan warureja kabupaten tegal.

Kuesioner berisi pertanyaan mengenai data responden dan pertanyaan yang bersifat tertutup dengan skala likert. Jawaban responden berupa pilihan dari lima alternatif jawaban, sebagai berikut:

⁴¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, 1998, h.115.

⁴² Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1997, h. 91.

S	:	Setuju	Penilaian	:	4
SS	:	Sangat Setuju	Penilaian	:	3
TS	:	Tidak Setuju	Penilaian	:	2
		Sangat Tidak			
STS	:	Setuju	Penilaian	:	1
1. Skor 5 untuk jawaban sangat setuju (S)					
2. Skor 4 untuk jawaban Setuju (SS)					
3. Skor 2 untuk jawaban Tidak Setuju (TS)					
4. Skor 1 untuk jawaban Sangat Tidak Setuju (STS)					

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Suharsimi (1990) metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Sedangkan *instrument* pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatan mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah.⁴³ Pengumpulan data merupakan upaya peneliti untuk mengumpulkan data bersifat angka, atau bisa juga data bukan angka, namun bisa dikuantifikasikan. Data angka-angka tersebut untuk selanjutnya diolah dengan

⁴³ Muchamad Fauzi, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Semarang: Walisongo Press, 2009, h. 171.

menggunakan rumus kerja statistik.⁴⁴ Untuk menjawab masalah penelitian, diperlukan data yang akurat di lapangan. Metode yang digunakan harus sesuai dengan obyek yang akan diteliti. Dalam penelitian lapangan ini, penulis menggunakan beberapa metode:

Metode Angket (Kuisisioner)

Pengertian metode angket yaitu suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan kepada orang lain yang dijadikan responden untuk dijawabnya.⁴⁵

Sebelum membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu dijelaskan tentang kisi-kisi yang merupakan pedoman bagi si peneliti dalam menyusun alat pengumpul datanya. Metode angket atau kuesioner digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data dari responden terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa kedungkelor kecamatan warureja kabupaten tegal. Sedangkan pengukuran data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah skala likert, yaitu skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi

⁴⁴ Rully indrawan dan poppy yaniawati, *Metodelogi Penelitian*, Bandung: PT Refika Aditama, 2014, h. 141.
⁴⁵ *Ibid* h. 173.

seseorang atau sekelompok orang mengenai suatu gejala atau fenomena sosial.⁴⁶

3.4 Variabel dan Indikator Penelitian

3.4.1 Definisi Konseptual

Variabel merupakan konstruk yang diukur dengan berbagai macam nilai untuk memberikan gambaran lebih nyata mengenai fenomena-fenomena. Konstruk adalah abstraksi fenomena kehidupan nyata yang diamati. Dengan demikian variabel merupakan representasi konstruk yang dapat diukur dengan berbagai macam nilai atau mediator antarkonstruk yang abstrak dengan fenomena nyata. Variabel memberikan gambaran lebih nyata mengenai fenomena yang digeneralisasi dalam konstruk.⁴⁷ Variabel berdasarkan hubungan antar variabel penelitian, dibedakan kedalam, (a) Variabel Bebas (*independent variable*); (b) Variabel Tak Bebas (*dependent variable*); (c) Variabel Moderasi (*moderating variable*); (d) Variabel Antara (*intervening variable*); dan (e) variabel kontrol (*control variable*).⁴⁸

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel Independent dan Variabel Dependent. Variabel

⁴⁶ Sumanto, *Teori dan Aplikasi Metode Penelitian (Psikologi, Pendidikan, Ekonomi, Bisnis dan Sosial)*, Jakarta, PT Buku Seru, 2014, h. 102.

⁴⁷ Etta Mamang Sangaji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: CV.ANDI OFFSET, 2010, h. 133.

⁴⁸ Rully Indrawan dan Poppy Yaniawati, *Metodologi Penelitian*, Bandung: PT Refika Aditama, 2014, h. 13.

Independent adalah variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel lain. Sedangkan Variabel Dependent adalah variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independent. Variabel Independent (X1) dalam penelitian ini adalah pendapatan. Pendapatan adalah total penerimaan (uang dan bukan uang) seseorang atau suatu rumah tangga selama periode tertentu, dan (x2) Religiusitas merupakan nilai-nilai agama yang dianut oleh seseorang. Semua agama umumnya memiliki tujuan yang sama dalam mengontrol perilaku yang baik dan menghambat perilaku buruk. Agama diharapkan memberikan kontrol internal untuk pemantauan diri penegakan dalam perilaku moral (Anderson & Tollison, 1992). Sedangkan variabel Dependent (Y) dalam penelitian ini adalah kepatuhan pembayaran. Pengertian kepatuhan Menurut Simon James sebagaimana yang dikutip oleh Gunadi, pengertian kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, intimidasi, peringatan, atau penerapan atau ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

3.4.2 Devinisi Operasional Variabel dan Skala Pengukuran

Definisi operasional atau sering dinamakan juga sebagai operasionalisasi variabel adalah kegiatan atau proses yang dilakukan peneliti untuk mengurangi tingkat abstraksi konsep sehingga konsep tersebut dapat diukur.⁴⁹ Operasional variabel diperlukan untuk menentukan indikator dan skala yang digunakan dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian.

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
Pendapatan (X_1)	Total penerimaan (uang dan bukan uang) dari responden (masyarakat desa kedungkelor) selama periode tertentu.	Total pendapatan pertahun	Data rasio
Religiusitas (X_2)	Religiusitas merupakan nilai-nilai agama yang dianut oleh responden (masyarakat desa kedungkelor). Semua agama	1.Keyakinan 2.Peribadatan 3.Pengamalan 4.Penghayatan 5.Pengetahuan	Skala Likert

⁴⁹Zulganef, *Metode Penelitian Sosial dan Bisnis*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2013, h. 84.

	umumnya memiliki tujuan yang sama dalam mengontrol perilaku yang baik dan menghambat perilaku buruk. Agama diharapkan memberikan kontrol internal untuk pemantauan diri penegakan dalam perilaku moral.		
Kepatuhan (Y)	perilaku wajib pajak (masyarakat kedungkelor) dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepatuhan membayar pajak.	< 30 september >30 september	Data Rasio

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penghimpunan atau pengumpulan, pemodelan dan transformasi data dengan tujuan untuk menyortir dan memperoleh informasi yang bermanfaat, memberikan saran, kesimpulan dan mendukung pembuatan keputusan.⁵⁰ Akan tetapi agar kesimpulan valid, maka data terlebih dahulu diuji kelayakannya. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi logistik(logistik regresion). Alasan penggunaan alat analisis logistik (*logistik regresion*) adalah karena variabel dependent bersifat dikotomi. Asumsi normal distribution tidak dapat dipenuhi karena variabel bebas merupakan campuran antara variabel continue (metrik) dan kategorial (non-metrik). Dalam hal ini dapat dianalisis dengan regresi logistik (*logistik regresion*) karena tidak perlu asumsi normalitas data pada variabel bebasnya.⁵¹

Model logistik regression

$$\ln \frac{p}{1-p} = b_0 + b_1 X_1 + b_2 X_2 + \dots + b_k X_k$$

Dimana :

$$\text{Odds (S } X_1, X_2, \dots, X_3) = \frac{p}{1-p}$$

P adalah probabilitas dengan variabel bebas $X_1, X_2, \dots, X_k$.
model log dari odds merupakan fungsi linear dari variabel bebas dan

⁵⁰ *Ibid* Hlm. 253.

⁵¹ Imam Ghozali, Aplikasi Multivariate dengan program SPSS.
Semarang: Universitas Diponegoro, 2015

ekivalen dengan persamaan multiple regression dengan log dari odds sebagai variabel terikat. Variabel bebasnya dapat berupa kombinasi variabel kontinyu (metrik) maupun variabel kategorial (non-metrik). Oleh karena lo dari odds sering disebut logit maka persamaan regresinya disebut multiple logistik regression.

3.5.1 Menilai Kelayakan Model Regresi

Kelayakan model regresi dinilai dengan menggunakan Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test. Lemeshow's Goodness of Fit Test.

Menguji hipotesis nol bahwa data empiris cocok atau sesuai dengan model (tidak ada perbedaan model atau data sehingga model dapat dikatakan fit). Jika nilai statistic Hosmer and Lemeshow's Goodness Fit Test sama dengan atau kurang dari 0,05, maka hipotesis nol ditolak yang berarti pada perbedaan signifikasi antara model dengan nilai observasinya sehingga Goodness fit model tidak baik karena model tidak dapat memperdiksi nilai observasinya. Jika nilai statistik Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test lebih besar dari 0,05, maka hipotesis nol tidak dapat ditolak dan berarti model mampu memprediksi nilai observasinya atau dapat dikatakan model dapat diterima karena cocok dengan data observasinya.

3.5.2 Menilai keseluruhan Model (overall model fit)

Langkah pertama adalah menilai overall fit model terhadap data. Beberapa test statistik diberikan untuk menilai hal ini. Hipotesis untuk menilai model fit adalah:

H_0 : Model yang dihipotesiskan fit dengan data

H_A : Model yang dihipotesiskan tidak fit dengan data

Dari hipotesis ini jelas bahwa tidak akan menolak hipotesis nol agar supaya model fit dengan data. Statistik yang digunakan berdasarkan pada fungsi likelihood. Likelihood L dari model adalah probabilitas bahwa model yang dihipotesiskan menggambarkan data input. Untuk menguji hipotesis nol dan alternatif L ditransformasikan menjadi $-2\text{Log}L$ penurunan likelihood ($-2LL$) menunjukkan model regresi yang lebih baik atau dengan kata lain model yang dihipotesiskan fit dengan data.

3.5.3 Menguji Koefisien Regresi

Uji t untuk menguji signifikansi konstanta dan setiap variabel independent.

Hipotesis :

H_0 = Koefisien regresi tidak signifikan

H_1 = Koefisien regresi signifikan

Pengambilan Keputusan (berdasarkan probabilitas)

- Jika probabilitas $> 0,05$ maka H_0 diterima
- Jika probabilitas $< 0,05$ maka H_0 ditolak

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah desa kedungkelor

Desa kedungkelor dilihat dari letak geografisnya merupakan desa yang berada di kecamatan warureja, kabupaten tegal, provinsi jawa tengah, indonesia. Desa Kedungkelor mempunyai luas 795 ha dengan batas wilayah sebelah barat laut jawa, sebelah timur Desa Lawangrejo, sebelah selatan Desa Banjarturi, sebelah barat Desa Demangharjo. Jumlah penduduk 6.704 orang terdiri dari 1.822 KK, Sebagian besar penduduk Desa Kedungkelor beragama Islam, yaitu sebanyak 6.694 orang, masyarakat Desa Kedungkelor rata-rata bermata pencaharian petani, buruh tani, wiraswasta dan Ibu rumah tangga.

4.1.2 Visi dan Misi

1. Visi

Terciptanya masyarakat yang rukun dalam beragama, sejahtera, berpengetahuan luas, sehat jasmani dan rohani, terpenuhny sarana dan prasarana, serta aman tertib dan terkendali.

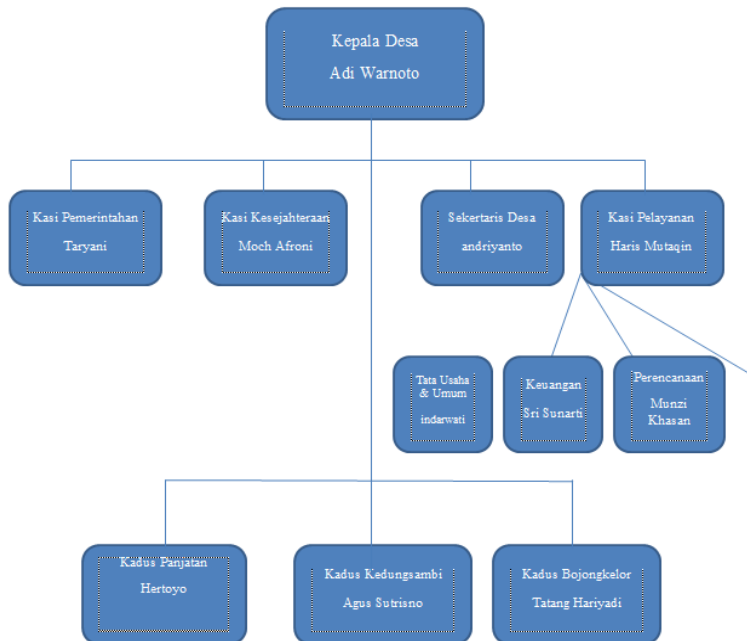
2. Misi

- a. Menciptakan suasana damai dalam beragama

- b. Menciptakan lapangan pekerjaan dan pemerataan pembangunan
- c. Mensukseskan dan meningkatkan kualitas serta kuantitas pendidikan wajib belajar 12 tahun
- d. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar masyarakat
- e. Meningkatkan keamanan dan ketertiban yang terkendali

4.1.3 Struktur Organisasi Desa Kedungkelor Kecamatan Warureja

Adapun susunan struktur organisasi Desa Kedungkelor Kecamatan Warureja sebagai berikut:



4.2 Karakteristik Responden

Karakteristik responden perlu disajikan dalam penelitian ini guna menggambarkan keadaan atau kondisi responden yang dapat memberi informasi tambahan untuk membantu memahami hasil penelitian. Penyajian data deskriptip penelitian bertujuan agar dapat dilihat profil dari data penelitian tersebut dan hubungan antar variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut. Adapun karakteristik-karakteristik penelitian terdiri dari jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan, penghasilan responden. Responden dalam penelitian ini adalah masyarakat desa kedungkelor yang berjumlah 100 orang. Berdasarkan hasil penelitian terhadap 100 responden melalui kuesioner didapat gambaran sebagai berikut:

4.2.1 Jenis Kelamin Responden

Adapun data jenis kelamin responden didesa kedungkelor dibagi menjadi dua jenis yaitu laki-laki dan perempuan dengan presentase sebagai berikut:

Table 4.2
Persentase Jenis Kelamin Responden

jenis kelamin	responden (orang)	Persentase (%)
Laki-laki	39	41%
Perempuan	56	59%
Total	95	100

Sumber : *Data Primer yang Diolah, 2019.*

Berdasarkan keterangan tabel diatas diketahui bahwa jenis kelamin masyarakat kedungkelor yang diambil menjadi

responden menunjukkan mayoritas berjenis kelamin perempuan berjumlah 56 responden atau dengan persentase 59% dan laki-laki berjumlah 39 responden atau dengan persentase 41%.

4.2.2 Usia Responden

Data mengenai usia responden peneliti mengelompokkan menjadi lima jenis, diantara adalah kurang dari 20 tahun, 21 – 30 tahun, 31 – 40 tahun, 41 – 50 tahun, dan lebih dari 50 tahun. Adapun data dari hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3
Persentase Usia Responden

Usia	responden (orang)	persentase (%)
21 - 30 th	26	27%
31 - 40 th	31	32%
41 - 50 th	30	31%
lebih dari 50 th	8	8%
Total	95	100

Sumber :*Data Primer yang Diolah, 2019.*

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa reponden yang berusia 21 – 30 tahun sebanyak 26 orang atau dengan persentase 26%, usia 31 – 40 tahun sebanyak 31 orang atau dengan persentase 31%, usia 41 – 50 tahun sebanyak 40 orang atau dengan persentase 43%, usia lebih dari 50 tahun sebanyak 8 orang atau dengan persentase 10%.

4.2.3 Pekerjaan Responden

Adapun data mengenai pekerjaan responden di desa kedungkelor adalah dikelompokkan dalam empat kategori yaitu: petani, pegawai negeri, wiraswasta, dan lain-lain. Adapun data hasil masyarakat kedungkelor yang diambil adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4
Persentase Pekerjaan Responden

Pekerjaan	responden (orang)	persentase (%)
Petani	33	34%
PNS	14	14%
Wiraswasta	26	27%
lain-lain	22	24%
Total	95	100

Sumber : *Data Primer yang Diolah, 2018.*

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa masyarakat desa kedungkelor yang memiliki pekerjaan petani sebanyak 33 orang atau dengan persentase 34%, pekerjaan PNS sebanyak 14 orang atau dengan persentase 14%, pekerjaan wiraswasta sebanyak 26 orang atau dengan persentase 27%, dan yang tersisa pekerjaan lainnya sebanyak 22 orang atau dengan persentase 24%.

4.2.4 Penghasilan Responden

Adapun data mengenai pekerjaan responden masyarakat kedungkelor adalah dikelompokkan dalam empat kategori yaitu:

Tabel 4.5
Persentase Penghasilan Responden

Penghasilan	Responden (Orang)	Persentase
Rp.8.000.000- Rp.20.000.000	35	36%
Rp.21.000.000- Rp40.000.000	31	32%
Rp.41.000.000- Rp.60.000.000	10	10%
Rp.61.000.000- Rp.250.000.000	19	20%
	95	100%

Sumber :*Data Primer yang Diolah, 2019.*

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa masyarakat kedungkelor yang memiliki penghasilan Rp.8.000.000,00-Rp.20.000.000,00 sebanyak 35 orang atau dengan persentase 36%, penghasilan Rp.21.000.000,00-Rp.40.000.000,00 sebanyak 31 orang atau dengan persentase 32%, penghasilan Rp.41.000.000,00-Rp.60.000.000,00 sebanyak 10 orang atau

dengan persentase 10%, dan yang tersisa penghasilan lebih dari Rp.61.000.000,00. sebanyak 19 orang atau dengan persentase 20%.

4.3 Analisis Regresi Logistik

Tabel 4.6

Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Classification Table ^a					
			Predicted		Percentage
			Kepatuhan Bayar Pajak		
	Observed		Tidak Patuh	Patuh	Correct
Step 1		Kepatuhan Bayar Pajak	Tidak Patuh	11	20
		Patuh	9	55	85,9
	Overall Percentage				69,5

a. The cut value is ,500

Sumber: Hasil penelitian 2019

4.3.1 Deskriptif Statistik

Analisis statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi (standar deviation), presentase dan maksimum-minimum. Berikut ini hasil statistik deskriptif penelitian ini:

Tabel 4.7
deskriptif data

Statistics		Pendapatan	Religiusitas
N	Valid	95	95
	Missing	0	0
Mean		38506315,79	15,86
Median		25000000,00	16,00
Std. Deviation		37547158,460	1,068
Minimum		8000000	12
Maximum		250000000	18

Dari hasil statistik deskriptif diatas, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Nilai rata-rata pada variabel pendapatan (X1) sebesar 38506315,79 kemudian pendapatan memiliki nilai minimum sebesar Rp. 8.000.000 selanjutnya nilai mak dari pendapatan sebesar Rp. 250000000 pendapatan memiliki persebaran data sebesar 37547158,460
2. Nilai rata-rata pada religiusitas wajib pajak (X2) sebesar 15,86. Kemudian memiliki nilai minimum sebesar 12 selanjutnya nilai max dari religiusitas wajib pajak sebesar 18 dan memiliki persebaran data sebesar 1,068

4.3.2 Uji Kelayakan Model Regresi

Kelayakan model regresi bertujuan untuk meniai kesesuaian model dengan data, dinilai dengan menggunakan

Hosmer and Lemeshow's Goodness of fit Tes yang diukur dengan nilai chi square. Probabilitas signifikasi yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan tingkat signifikasi α sebesar 10%. Hipotesis untuk menilai kelayakan model regresi adalah:

Tabel 4.8
Hasil Uji Kelayakan Model Regresi

Hosmer and Lemeshow Test			
Step	Chi-square	df	Sig.
1	15,010	8	,059

Terlihat angka probabilitas adalah 0,059 yang adalah > 0.05 . Hal ini berarti model regresi binary layak dipakai untuk analisis selanjutnya, karena tidak ada perbedaan nyata antara klasifikasi yang diprediksi dengan klasifikasi yang diamati.

4.3.3 Menilai Keseluruhan Model (overall Model Fit)

Penilaian keseluruhan model dilakukan dengan membandingkan nilai antara -2 Log Likelihood (-2LL) pada awal (Block Number=0), dimana model hanya memasukan konstanta dengan -2 Log Likelihood (-2LL) pada akhir (Block Number=1), dimana model memasukan konstanta dan variabel bebas.

Hipotesis untuk menilai fit adalah:

Ho: Model yang dihipotesiskan fit dengan data

Ha: model yang dihipotesiskan tidak fit dengan data

Tabel 4.9

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R	Nagelkerke R
		Square	Square
1	102,170 ^a	,171	,238

a. Estimation terminated at iteration number 5 because parameter estimates changed by less than ,001.

Pada tabel 4.11 angka -2 Log likerlihood dimana pada awal (Block Number=0) angka -2 Log likelihood adalah 119,992, sedangkan pada (Block Number=1) angka -2 Log likelihood turun menjadi 102,170 penurunan ini, dimana likelihood pada regresi binari mirip dengan pengertian Sum of squared error pada model regresi, menunjukkan model regresi yang lebih baik. Hal ini menunjukkan model regresi yang lebih baik.

4.3.4 Menguji Koefisien Regresi

Analisis model regresi logistik dilakukan untuk mengetahui sejauh mana profitabilitas terjadinya variabel dependen dapat diprediksi dengan variabel independen.

Tabel 4.10
Pengujian Hipotesis

Variables in the Equation		B	S.E.	Wald	Df	Sig.	Exp(B)
Step 1 ^a	Religiusitas	,286	,232	1,522	1	,017	1,332
	Pendapatan (Ln)	1,558	,443	12,345	1	,000	4,748
	Constant	3,345	8,775	11,958	1	,001	,000

a. Variable(s) entered on step 1: Religiusitas, Pendapatan (Ln).

Pada tabel 4.15 dengan uji t yang terlihat pada bagian akhir output, terlihat bahwa konstanta dan variabel religiusitas adalah signifikan secara statistik. Pada konstanta yang 0,17 dan variabel pendapatan yang 0,00, dimana keduanya dibawah 0,05.

Dengan demikian, sekarang model regresi layak untuk digunakan memprediksi variabel kepatuhan.

Sehingga didapatkan model logit dari model terakhir ini adalah sebagai berikut :

$$\text{Ln} \frac{p}{1-p} = 3,345 + 1,558 \text{ pendapatan} + 0,286 \text{ religiusitas}$$

Dari model akhir ini didapatkan bahwa variabel yang berpengaruh terhadap kepatuhan masyarakat wajib pajak adalah variabel pendapatan dan religiusitas.

4.3.5 Penafsiran dan Prediksi

1. Religiusitas

Nilai koefisien religiusitas 0,286 dengan tanda positif menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat religiusitas masyarakat kedungkelor akan semakin besar probabilitas taat membayar pajak. Hal ini dapat juga dikatakan setiap kenaikan satu tingkat religiusitas 1% maka akan menaikkan probabilitas kepatuhan pajak sebesar 28,6%. Mengingat angka sig 0,017 (dibawah 5%) berarti variabel religiusitas benar-benar berpengaruh terhadap probabilitas kepatuhan membayar pajak pada masyarakat desa kedungkelor.

2. Pendapatan

Nilai koefisien pendapatan 1,558 dengan tanda positif menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat kedungkelor akan semakin besar probabilitas taat membayar pajak. Temuan ini dapat juga dikatakan setiap kenaikan 1 juta rupiah, maka akan mendorong masyarakat kedungkelor patuh membayar pajak. Mengingat angka sig 0,000 (dibawah 5%) berarti variabel pendapatan benar-benar berpengaruh terhadap probabilitas kepatuhan membayar pajak pada masyarakat desa kedungkelor.

3. Constant

Nilai koefisien konstanta 3,345 dengan tanda positif menunjukkan bahwa saat korelasi tidak ada pendapatan, dan tidak melibatkan variabel religiusitas, maka masyarakat desa kedungkelor sesungguhnya sudah taat membayar pajak. Mengingat angka sig 0,001 (dibawah 5%) berarti potensi dasar masyarakat kedungkelor memang sudah taat membayar pajak.

4. Sehingga variabel yang paling mendorong masyarakat kedungkelor membayar pajak adalah variabel pendapatan dengan koefisien 1,558.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel pendapatan dan religiusitas wajib pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan didesa kedungkelor. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Religiusitas

Nilai koefisien religiusitas 0,286 dengan tanda positif menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat religiusitas masyarakat kedungkelor akan semakin besar probabilitas taat membayar pajak, akan menaikkan probabilitas taat pajak sebesar 28,6%.

2. Pendapatan

Nilai koefisien pendapatan 1,558 dengan tanda positif menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat kedungkelor akan semakin besar probabilitas taat membayar pajak.

3. Constant

Nilai koefisien konstanta 3,345 dengan tanda positif menunjukkan bahwa saat diasumsikan tidak ada pendapatan, dan religiusitas, maka masyarakat desa kedungkelor sesungguhnya sudah taat membayar pajak. Mengingat angka sig 0,001 (dibawah 5%)

berarti potensi dasar masyarakat kedungkelor memang sudah taat membayar pajak.

4. Variabel paling dominan mendorong masyarakat kedungkelor membayar pajak adalah variabel pendapatan yaitu dengan koefisien 1,558.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan, penulis memberikan saran-saran yang kiranya dapat bemanfaat kepada semua pihak yang terkait dalam penelitian ini. Adapun saran-saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat Desa Kedungkelor

Bagi masyarakat Desa Kedungkelor dihimbau membayar wajib pajak tepat waktu.

2. Bagi Petugas Pemungutan Pajak

Bagi Petugas Pemungutan Pajak sebaiknya memberikan sosialisasi kepada masyarakat dalam hal melakukan pembayaran pajak, lebih profesional, ramah dan aktif untuk melayani para wajib pajak dengan sebaik-baiknya agar wajib pajak lebih meningkatkan kepatuhan pajaknya.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Penulis sangat menyadari dengan keterbatasan dan kemampuan yang dimiliki, banyak hal yang masih perlu dikaji terkait dengan penelitian yang penulis lakukan. Diharapkan bagi

peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel-variabel lain dalam kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan.

5.3 Penutup

Alhamdulillah dengan rasa syukur penulis memanjatkan puji kehadirat Allah SWT, yang atas limpahan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah SAW yang kita nantikan syafa'atnya kelak di akhirat nanti.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesainya skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi sederhana ini mampu memberikan manfaat bagi kita semua, khususnya bagi pembaca ada umumnya dan bagi penulis sendiri di masa yang akan datang. *Aamiin Yaa Rabbal Alamin.*

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar Saifuddin, Metode Penelitian Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1997
- Andika Utama dan Budi Wahyudi, Pengaruh Religiusitas Dan Perilaku Kepatuhan Wajib
- Pajak Orang Pribadi Di Provinsi DKI Jakarta No.2, 2016
- Ancok dan Suroso, Psikologi Islam, Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2011.
- Arikunto Suharsimi, prosedur penelitian suatu pendekatan praktek jakarta: rineka cepta 1998
- Dermawan Deni Metode penelitian kuantitatif bandung: pt remaja posdakarya 2013
- Departemen Agama RI Al-Quran dan Terjemahannya, Bandung: PT Bumi Restu
- Departemen pendidikan nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka,2008.
- Devano dan siti Kurnia Rahayu, Perpajakan, Konsep, Teori dan Isu Jakarta: Kencana Prenada, 2006
- Drs. Nurdin Hidayat, M.M M.SI dan Dr. Dedi Purwana Es,. M.Bus, Perpajakan Teori dan Praktek, PT raja grafindo persada, jakarta: 2017
- Drs Danang Sunyoto SE.,SH., MM, Analisis Regresi dan Uji Hipotesis,PT Buku Seru, Jakarta: 2011
- Ghozali imam Aplikasi Analisis Multivariati dengan Program SPSS, Jakarta: Grafindo, 2006
- Gunadi, Indonesia Taxation, A Reference Guide, Jakarta: Multi Utama, Publisng, 2002
- Fahmi, Gus. *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: PT Rajagrafindo

Persada. 2011.

Fauzi Muhammad, Metode Penelitian Kuantatif, Semarang: Walisongo press 2009

Isthi Wahyuning Tyas, Pengaruh Umur, Pendidikan, Penghasilan Bruto, Dan Moral Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Setia Budi Jakarta: Vol IV no 22 (september 2013)

Jalaluddin, Psikologi Agama, Jakarta:Rajagrafindo Persada, 2012

Masyahrul Tony, Pengantar Perpajakan, Jakarta: PT Grasinda. 2005

Nashori, Fuad dan Mucharam, R.D Mengembangkan Kreativitas Dalam Perspektif Psikologi Islam, Yogyakarta: Menara Kudus, 2002

Rahayu, Siti Kurnia dan Ely Suhayati, *Perpajakan Indonesia Teori danTeknisPerhitungan*, Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010

Rahardja Pratama dan Mandala Manurung , Teori Ekonomi Mikro, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi, Jakarta:2010

Reksoprayitno, Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi, Jakarta: Bina Grafika, 2004

Rimsky K Judisseno, Perpajakan, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001

Rochmat Soemitro, Asas dan Dasar Perpajakan, Bandung: Eresco, 1987

Kurniawan Albert Metode Riset Untuk Ekonomi dan Bisnis : Teori, Konsep & Praktik Penelitian Bisnis (Dilengkapi Perhitungan Pengolahan Data dengan IBM SPSS 22.0), Bandung: alfabeta, 2014

Lexy j moleong Metodologi Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2009

Munawir Ahmad Warson, Al Munawir kamus arab –indonesia surabaya: pustaka progresif 2012

- Martono Nanang, Metode Penelitian Kuantitatif (analisis isi dan analisis data sekunder) jakarta: pt raja grafindo persada 2014
- Suryani dan Hendryadi, Metode Riset Kuantitatif Teori dan Aplikasi pada Penelitian bidang Manajemen dan Ekonomi Islam Jakarta: Prenada Media grup 2015
- Sumanto , Teori dan Aplikasi Metode Penelitian (Psikologi, Pendidikan, Ekonomi, Bisnis dan Sosial), Jakarta: PT Buku Seru, 2014
- Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, Bandung: Alfabeta
- Soekartiwi, Faktor-faktor produksi, Jakarta Salemba Empat, 2002
- Widodo Widi, Moralitas budaya dan kepatuhan pajak, Bandung: Alfabeta 2010
- Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*, Yogyakarta, Pustaka Baru Press, 2015
- Yesi Mutiara Basri dan Raja Adri Satriawan Surya, Pengaruh Keadilan, Norma Ekspektasi, Sanksi dan Religiusitas Terhadap Niat dan Ketidakpatuhan Pajak, universitas riau, vol VII no 3 (desember 2014)

Lampiran-lampiran

Lampiran 1

Kuesioner Penelitian **IDENTITAS RESPONDEN**

Nama :

Umur :

Jenis Kelamin :.....

No Telepon :.....

Pekerjaan :

☐

PNS

☐

Karyawan Swasta

☐

Pegawai BUMN

☐
☐

Wirausaha

Lainnya..

Pendapatan/ Tahun :

☐

< 50 Juta

☐

50 – 250 Juta

25 ☐ 100 Juta

☐

> 500 Juta

PETUNJUK PENGISIAN

Berikan tanda silang (X) pada salah satu jawaban yang paling sesuai dengan keadaan Bapak/Ibu/Saudara/i pada kolom yang sudah tersedia sebagai berikut :

SS : Sangat Setuju

S : Setuju

TS : Tidak Setuju

SST : Sangat Tidak Setuju

A. Pendapatan (X1)

1. Berapa total pendapatan anda pertahun Rp.....

B. Religiusitas (X2)

No	Pernyataan	Jawaban			
		1	2	3	4
2	Apakah anda percaya bahwa agama merupakan sumber dari segala sumber hukum.	Sangat Percaya	Percaya	Tidak Percaya	Sangat Tidak percaya
3	Setujukah anda membayar pajak sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat Allah	Sangat setuju	Setuju	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju

	SWT				
4	Setujukah anda jika sudah membayar pajak merasa lebih tenang	Sangat Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju
5	Setujukah anda bahwa agama mengajarkan kita untuk selalu melaksanakan kewajiban dan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi terhadap negara adalah membayar pajak.	Sangat Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju
6	Apakah anda percaya bahwa jika mentaati perintah agama akan menaati perintah negara	Sangat percaya	percaya	Tidak Percaya	Sangat tidak percaya

C. Kepatuhan Pembayaran Pajak (Y)

7. Kapan anda membayar pajak bumi dan bangunan ?

☐ Kurang dari bulan september

☐ Lebih dari bulan september

Lampiran 2

Hasil Jawaban Angket

No	Nama Responden	Y	X ₁	X ₂				
				1	2	3	4	5
1	Karyoto	1	50000000	3	4	2	4	3
2	Toipah	1	80000000	3	3	1	2	3
3	Sriah	1	20000000	3	3	4	3	2
4	Jamilah	1	30000000	3	3	3	4	3
5	Diniati	0	25000000	2	4	3	3	3
6	Ahmad Irfan	1	30000000	3	3	4	2	4
7	Putri Septiani	1	10000000	4	3	4	3	3
8	Karsih	1	15000000	3	4	4	4	2
9	Damiri	1	40000000	2	3	3	3	4
10	Kanidah	1	40000000	3	3	4	3	2
11	Nurkhasanah	1	25000000	3	3	3	4	3
12	Sutrisno Mudiah	0	23000000	2	4	3	3	3
13	Rosidin	0	26000000	3	3	4	2	4
14	Darip	1	35000000	3	3	3	4	3
15	Suteri khamid	1	42000000	4	2	3	3	4
16	Nurikin	1	40000000	4	4	4	3	3
17	Slamet tarbuni	1	200000000	3	4	4	3	4
18	Daenah	0	25000000	3	3	3	2	3
19	Widodo Pranugroho	0	28000000	2	4	4	4	4
20	Kusaeri	1	37000000	4	3	3	4	3
21	Sushendartmo	1	23000000	3	2	3	3	3
22	Muktar Marwah	1	17000000	4	3	4	3	2
23	Tati sudarni	1	15000000	3	3	4	3	3

24	Wastam	1	15000000	2	4	3	3	3
25	Rasumi	0	17000000	3	3	4	2	4
26	Kaswani	1	100000000	3	3	3	4	3
27	Sisu	1	61000000	3	3	3	4	3
28	Rofiko	1	71000000	2	4	3	3	3
29	Saroh	1	54000000	3	3	4	2	4
30	Agus salim	1	33000000	2	4	3	3	4
31	Maghfiroh	1	57000000	3	4	3	3	3
32	Rohibah	1	112000000	4	4	2	4	3
33	Sawiyah Wahab	0	9000000	3	3	3	4	3
34	Harun	0	12000000	3	3	3	4	3
35	Yatimah	0	21000000	4	2	3	3	4
36	Caswiyah	1	16000000	4	4	4	3	3
37	Tarmudi	1	21000000	3	4	4	3	4
38	Abdul Cholil	1	120000000	3	3	3	2	3
39	Dasiah	0	18400000	2	4	4	4	4
40	Syawal	1	62400000	4	3	3	4	3
41	Drajat Wibisono	1	60000000	3	2	3	3	3
42	Tasurun	1	58000000	4	3	4	3	2
43	Liem Swikie	1	95000000	3	3	4	3	3
44	Kaeni	0	48000000	2	4	3	4	3
45	Sudarni	1	24000000	3	3	4	3	3
46	Sonari	0	10000000	3	2	3	4	2
47	Tarjuki	1	38000000	4	3	4	3	3
48	Su'ud	1	50000000	3	4	4	4	2
49	Kasiyah	0	13000000	2	3	3	3	4
50	Kadnawi	1	83500000	3	3	4	3	2
51	Carmo	1	65000000	3	3	3	4	3
52	Saniatun	0	21000000	2	4	3	3	3

53	Danah	1	12000000	3	3	4	2	4
54	Rabidun	1	72000000	2	4	3	3	4
55	Marsumiati	0	28000000	3	4	3	3	3
56	Muayah	0	10800000	2	4	3	4	3
57	Abdul Kalim	1	87000000	3	3	4	3	3
58	Sutimah Munasik	0	18400000	3	2	3	4	2
59	Basuki	1	21000000	4	3	4	3	3
60	Dofar Muslichah	0	27000000	3	4	4	4	2
61	Sobiri	0	19000000	2	3	3	3	4
62	Afun Winarti	1	15000000	3	3	4	3	2
63	Rakumi	1	16000000	3	3	3	4	3
64	Warniah	0	17000000	2	4	3	3	3
65	Carmo	1	17000000	3	3	4	2	4
66	Taryumi	1	17000000	4	3	4	3	3
67	Carini	0	17000000	3	4	4	4	2
68	Warno	1	20000000	2	3	3	3	4
69	Sisworo	0	30000000	3	3	4	3	2
70	Ranti	1	30000000	3	3	3	4	3
71	M. Rahmat	1	20000000	2	4	3	3	3
72	Sairoh	0	80000000	3	3	4	2	4
73	Karno Jaka	0	36000000	4	3	4	3	3
74	teti sriwiharti	1	18000000	3	4	4	4	2
75	juriyah Saodah	1	16000000	2	3	3	3	4
76	rumini	1	18000000	3	3	4	3	2
77	Sutrisno	0	19000000	3	3	3	4	3
78	Rasmani	1	18000000	2	4	3	3	3
79	Sindung	0	15600000	3	3	4	2	4
80	Ali Faturi	1	60000000	2	4	3	3	4

81	Danoyo	1	24000000	3	4	3	3	3
82	Tarano	1	250000000	2	4	3	4	3
83	Ridwan	1	100000000	3	3	4	3	2
84	Harjo	1	50000000	3	3	3	4	3
85	Siweng	0	10000000	2	4	3	3	3
86	Cahyo	0	15000000	3	2	3	4	2
87	Rohyati	1	18000000	4	3	4	3	3
88	Suripno	1	18000000	3	4	4	4	2
89	Rohaenih	0	28000000	2	3	3	3	4
90	Warkonah	1	40000000	3	3	4	3	2
91	Saridah	1	35000000	3	3	3	4	3
92	Agus	1	25000000	2	4	3	3	3
93	Kusmiah	0	11000000	3	3	4	2	4
94	iin	1	10000000	4	3	4	3	3
95	Miah	0	8000000	3	4	4	4	2

Lampiran 3

Persentase Jenis Kelamin Responden

jenis kelamin	responden (orang)	Persentase (%)
Laki-laki	39	41%
Perempuan	56	59%
Total	95	100

Sumber :Data Primer yang Diolah, 2019.

Persentase Usia Responden

Usia	responden (orang)	persentase (%)
21 - 30 th	26	27%
31 - 40 th	31	32%
41 - 50 th	30	31%
lebih dari 50 th	8	8%
Total	95	100

Sumber :Data Primer yang Diolah, 2019.

Persentase Pekerjaan Responden

Pekerjaan	responden (orang)	persentase (%)
Petani	33	34%
PNS	14	14%
Wiraswasta	26	27%
lain-lain	22	24%
Total	95	100

Sumber :Data Primer yang Diolah, 2018.

Persentase Penghasilan Responden

Penghasilan	Responden (Orang)	Persentase

Rp.8.000.000- Rp.20.000.000	35	36%
Rp.21.000.000- Rp40.000.000	31	32%
Rp.41.000.000- Rp.60.000.000	10	10%
Rp.61.000.000- Rp.250.000.000	19	20%
	95	100%

Sumber :*Data Primer yang Diolah, 2019.*

Lampiran 4

Logistic Regression

[DataSet1] D:\skripsi rosi fix bismillah\output spss dari bapak benar fix.sav

Case Processing Summary

Unweighted Cases ^a		N	Percent
Selected Cases	Included in Analysis	95	100,0
	Missing Cases	0	,0
	Total	95	100,0
Unselected Cases		0	,0
Total		95	100,0

a. If weight is in effect, see classification table for the total number of cases.

Dependent Variable Encoding

Original Value	Internal Value
Tidak Patuh	0
Patuh	1

Block 0: Beginning Block

Iteration History^{a,b,c}

			Coefficients
Iteration			Constant
Step 0	1	120,011	,695
	2	119,992	,725
	3	119,992	,725

a. Constant is included in the model.

- b. Initial -2 Log Likelihood: 119,992
- c. Estimation terminated at iteration number 3 because parameter estimates changed by less than ,001.

Classification Table^{a,b}

		Predicted			
		Kepatuhan Bayar Pajak			
		Tidak Patuh	Patuh		
	Observed			Percentage Correct	
Step 0	Kepatuhan Bayar Pajak	Tidak Patuh	0	31	,0
		Patuh	0	64	100,0
	Overall Percentage				67,4

a. Constant is included in the model.

b. The cut value is ,500

Variables in the Equation

		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 0	Constant	,725	,219	10,974	1	,001	2,065

Variables not in the Equation

			Score	df	Sig.
Step 0	Variables	Pendapatan (Ln)	13,945	1	,000
		Religiusitas	,960	1	,327
	Overall Statistics		15,092	2	,001

Block 1: Method = Enter

Iteration History ^{a,b,c,d}					
Iteration	-2 Log		Coefficients		
	likelihood	Constant	Pendapatan (Ln)	Religiusitas	
Step 1	1	104,270	-19,708	1,009	,194
	2	102,241	-28,343	1,452	,272
	3	102,171	-30,262	1,553	,286
	4	102,170	-30,345	1,558	,286
	5	102,170	-30,345	1,558	,286

a. Method: Enter

b. Constant is included in the model.

c. Initial -2 Log Likelihood: 119,992

d. Estimation terminated at iteration number 5 because parameter estimates changed by less than ,001.

Omnibus Tests of Model Coefficients

		Chi-square	df	Sig.
Step 1	Step	17,822	2	,000
	Block	17,822	2	,000
	Model	17,822	2	,000

Model Summary

		Cox & Snell R	Nagelkerke R
Step	-2 Log likelihood	Square	Square
1	102,170 ^a	,171	,238

a. Estimation terminated at iteration number 5 because parameter estimates changed by less than ,001.

Hosmer and Lemeshow Test

Step	Chi-square	df	Sig.
1	15,010	8	,059

Classification Table^a

		Predicted		
		Kepatuhan Bayar Pajak		Percentage Correct
		Tidak Patuh	Patuh	
Step 1	Observed			
	Kepatuhan Bayar Pajak	Tidak Patuh	Patuh	35,5
	Tidak Patuh	Patuh		85,9
	Overall Percentage			69,5

a. The cut value is ,500

Variables in the Equation

		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)	95% C.I. for EXP(B)	
								Lower	Upper
Step 1 ^a	Pendapatan (Ln)	1,558	,443	12,345	1	,000	4,748	1,991	11,321
	Religiusitas	,286	,232	1,522	1	,217	1,332	,845	2,099
	Constant	3,345	8,775	11,958	1	,001	,000		

a. Variable(s) entered on step 1: Pendapatan (Ln), Religiusitas.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Rosi Iswara
2. Tempat, Tanggal Lahir : Tegal, 5 Januari 1996
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Alamat Asal : Desa Kedungkelor Rt 07 Rw 05 Kec.
Warureja Kab. Tegal
6. Alamat Sekarang : Nusa Indah 2 No.22, Tambakaji,
Ngaliyan Semarang
7. E-mail/No.HP : rosiiswara12@gmail.com/085200268535
8. pendidikan Formal
 1. 2002-2008 : SDN 05 Mulyoharjo
 2. 2008-2011 : SMPN 03 Pemalang
 3. 2011-2014 : MAN Pemalang
9. Pengalaman Organisasi
 1. JQH : 2014-2016
 2. KSPM : 2015-2016

Semarang, 25 Juli 2019

Rosi Iswara